

## **BAB 3**

### **Babom dan Babius dalam Konstruksi Identitas**

Bagian ini merupakan gambaran saya tentang kehidupan orang-orang Bajo di Kabalutan dan keterkaitan mereka dengan konstruksi identitas akibat praktek pemboman (babom) dan pembiusan (babius) ikan di kepulauan Togeana. Saya mencoba memaparkan tentang pengetahuan dan pengalaman-pengalaman subyektif seseorang tentang praktek babom dan babius ikan di kepulauan Togeana, baik orang Bajo sendiri maupun orang non-Bajo atau desa lain. Saya juga akan memperlihatkan konteks-konteks seperti apa saja persoalan babom dan babius ini menjadi bagian dari artikulasi identitas orang Bajo, serta siapa saja aktor yang melakukan konstruksi tersebut. Pada bagian akhir saya mencoba memaparkan beberapa efek dari pembentukan identitas orang Bajo sebagai tukang babom dan babius ini terhadap akses mereka atas sumberdaya alam di laut. Efek-efek tersebut menjadi penting untuk ditunjukkan sebagai salah satu faktor yang mendorong sekelompok orang Bajo di Kabalutan untuk melakukan konstruksi identitas menjadi konservasionis sebagaimana akan saya jelaskan pada bagian berikutnya.

#### **3.1. Orang Bajo di Kabalutan**

Kabalutan adalah nama sebuah desa di kecamatan Walea Kepulauan. Desa ini merupakan lokasi di mana Celia Lowe pernah melakukan penelitian antropologisnya antara tahun 1996-1998. Dalam etnografinya Lowe menggunakan istilah 'Susunang' untuk menunjuk Kabalutan dan suku 'Sama' untuk Bajo. Nama Susunang memang lebih dikenal oleh orang-orang Bajo di Kabalutan, bahkan oleh orang Bajo di desa lain di luar kepulauan Togeana. Akan tetapi, dalam komunikasi dengan saya, nama Kabalutan lebih sering digunakan. Saya memilih untuk tetap menggunakan istilah 'Kabalutan' dan 'Bajo', dua istilah yang saya maupun para informan gunakan selama ini ketika kami saling berinteraksi di kepulauan Togeana.

Menurut catatan kepala desa, penduduk Kabalutan pada tahun 2006 berjumlah lebih dari 2000 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabalutan sebagai pemukiman terpadat kedua di seluruh kepulauan Togeian setelah desa Wakai. Karena jumlah populasinya yang cukup tinggi, dalam dua pemilihan umum (Pemilu) terakhir, yaitu tahun 1999 dan 2004, desa Kabalutan selalu menjadi incaran beberapa politikus daerah yang menjadi calon anggota DPRD kabupaten Touna sebagai wilayah yang potensial untuk mendulang suara. Menjelang pemilu 2004 lalu, seorang calon anggota DPRD dari sebuah partai politik pernah menitipkan beberapa lembar poster kampanye dirinya kepada saya untuk diberikan kepada seorang pendukungnya di Kabalutan. Menurutnya, di Kabalutan terdapat hampir 1000 orang yang memiliki hak memilih. Ia memperhitungkan jika berhasil memperoleh sepertiga saja dari jumlah seluruh pemilih di Kabalutan, itu berarti ia sudah merebut hampir separuh dari total suara yang harus ia kumpulkan dari daerah pemilihannya. Sebagai seorang aktivis LSM lokal, ia merasa orang di kepulauan Togeian, termasuk Kabalutan, telah mengenal dirinya. Ia merasa memiliki basis pendukung di masyarakat sehingga berani bersaing dengan calon lain untuk menjadi anggota DPRD Touna.

Akan tetapi, ternyata ia hanya memperoleh tak lebih dari 10 suara, itu pun pada TPS yang ada di desa asalnya. Tak ada satupun suara di Kabalutan yang mencoblos namanya. Dalam pemilihan bupati Touna tahun 2005 lalu, Kabalutan juga menjadi desa yang dianggap potensial mendulang suara. Jumlah penduduk yang tinggi seakan menempatkan Kabalutan sebagai desa 'emas' dalam kegiatan politik lokal, meski belum tentu berlaku pula pada konteks lain di luar politik.

Kabalutan hanyalah satu dari beberapa kelompok pemukiman yang mayoritas penduduk adalah orang-orang Bajo. Beberapa kelompok pemukiman lainnya adalah Milok, Pulau Anam, Kulinkinari, Pulau Papan, Siatu dan Panabali. Sebagaimana umumnya pemukiman orang-orang Bajo di desa lain, desa Kabalutan dibangun di atas sekumpulan pulau karang kecil dan berkapur. Rumah-rumah penduduk dibangun mengelilingi pulau-pulau karang tersebut, di mana sebagian bangunannya berada di atas permukaan laut yang ditopang beberapa tiang dari kayu bulat. Bentuk bangunan

seperti itu memudahkan mereka meletakkan perahu mereka di kolong rumah sehingga lebih mudah untuk mengakses laut.

Dari arah laut di luar desa, pemukiman di Kabalutan menampilkan panorama kumpulan rumah-rumah kayu dalam jarak yang sangat rapat satu sama lain. Sebagian rumah-rumah tersebut beratap seng, dan sebagian lainnya terbuat dari anyaman daun sagu. Saya dan kepala Desa pernah mencoba menghitung jumlah bangunan rumah yang ada di Kabalutan, yaitu mencapai sekitar 600 rumah lebih. Jumlah tersebut mungkin terbanyak dibanding desa lain, kecuali desa Wakai. Di dalam pemukiman, jalan setapak dibangun dari semen, sedangkan sebagai penghubung antara pulau karang yang satu dengan lainnya dibuat jembatan kayu. Sekitar tahun 2006 lalu, Kabalutan mendapat bantuan sepeda motor untuk membantu tugas kepala desa. “Jarak dari dusun I ke dusun II itu bisa 1 kilometer. Kalau ada masalah mendadak, lumayan jauh jalan kaki. Dengan motor darat [sepeda motor] jadi lebih cepat,” kata Kepala Desa suatu hari pada saya. Ini mungkin pertama kalinya desa Kabalutan dilintasi oleh sepeda motor.

**Gambar 3.1. Pemukiman di Kabalutan**



Sumber: Sundjaya

Mengingat pulau-pulau karang tempat desa Kabalutan berdiri ini terpisah dari daratan pulau di sekitarnya, maka akses terhadap sumber air bersih menjadi persoalan bagi penduduk Kabalutan. Mereka harus mendayung perahu sekitar 45 menit, atau menggunakan perahu bermotor sekitar 15 menit, yang berisi jeriken-jeriken plastik ukuran besar untuk mengambil air bersih di ‘lapangan’ atau Temparan Igah. Pada saat musim kemarau, debit air pun mengecil. Pada kondisi seperti itu, beberapa perahu biasanya mengantri di muka pancuran. Saya pernah ikut mengantri untuk mengambil air sejak pukul 2 siang hingga sekitar jam 5 sore, dan baru mencapai Kabalutan kembali pada pukul 6 sore.

Celia Lowe telah menuliskan tentang orang Bajo atau Sama’ di Kabalutan dengan cukup komprehensif. Dalam *Wild Profusion* (2006), Lowe menyajikan data-data historis tentang asal usul orang Bajo di kepulauan Togeian, serta bentuk-bentuk

**Universitas Indonesia**

relasi sosial mereka dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi konstruksi identitas Sama' terjadi di antara mereka maupun kelompok di luar mereka.

Berdasarkan penelusuran sejarah oleh Lowe, orang Bajo kemungkinan telah bermukim di kepulauan Togeian sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Mereka telah melakukan perdagangan teripang dan hasil laut lainnya dengan para pedagang asal Bugis yang mendiami wilayah di sekitar gunung Benteng. Para peneliti asal Belanda maupun catatan perjalanan pegawai pemerintah Hindia Belanda menunjukkan adanya pertemuan mereka dengan orang-orang yang diindikasikan sebagai orang Bajo di kepulauan Togeian (Lowe, 2006:88-91).

### **3.2. Babom dan Babius: Konstruksi Identitas Orang Bajo**

Kamis, 10 Januari 2002, dalam gedung Nirwana, bekas bioskop satu-satunya yang ada di Ampana, diselenggarakan sebuah lokakarya selama tiga hari yang bertujuan melakukan pembahasan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepulauan Togeian yang telah disusun pada tahun 1987 oleh sebuah perusahaan konsultan asal Palu bernama CV. Plano. Dalam daftar undangan terdapat sedikitnya 120 orang peserta hadir yang mayoritas adalah utusan dari 37 desa yang ada di kepulauan Togeian. Kepulauan Togeian saat itu masih termasuk dalam wilayah administratif kabupaten Poso.

Hamid, penduduk desa Pulo Anam, menunjukkan sikap jengkel pada Rais, salah seorang penduduk desa Kabalutan. Dengan bahasa Bajo, Hamid terdengar memberi nasihat pada Rais dengan nada suara cukup keras memenuhi ruangan. Malam itu, setelah menyelesaikan makan malam bersama, di ruang tengah kantor Yayasan Toloka di Ampana, saya bersama dan beberapa anggota Toloka dan orang-orang dari kepulauan Togeian berbincang tentang jalannya acara lokakarya yang baru saja tuntas sore tadi. Rais dan Hamid hadir dalam pertemuan malam itu.

Kejengkelan Hamid pada Rais dipicu oleh ucapan Wisnu, seorang narasumber yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Poso, pada salah satu sesi lokakarya. Wisnu, saat memaparkan program perikanan pemda Poso di Kepulauan Togeian di hadapan para peserta berucap: "Orang Bajo ini memang bodoh, sumber

penghasilannya mereka hancurkan sendiri. Kalau karang hancur *kan* mereka sendiri yang susah cari ikan”. Saya yang kebetulan duduk di sebelah Wisnu sebagai moderator juga mendengar kata-kata itu dengan jelas. Komentar Wisnu seperti itu adalah sikapnya terhadap penggunaan bahan peledak dan racun sianida oleh nelayan di kepulauan Togean yang dianggapnya telah merusak terumbu karang. Menurut Wisnu, terumbu karang adalah habitat bagi berbagai jenis biota laut yang selama ini menjadi sumber ekonomi nelayan setempat. Dia menyimpulkan bahwa penggunaan bahan peledak atau racun sianida dilakukan oleh orang-orang Bajo di kepulauan Togean. Bagi Wisnu, orang Bajo telah merusak karang sebagai sumber penghasilan bagi mereka sendiri. Tak ada satu pun komentar atau protes dari peserta atas ucapan Wisnu tersebut, termasuk Rais yang saya lihat duduk pada barisan paling depan. Peserta hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan soal program perikanan kabupaten Poso untuk kepulauan Togean, seperti penyaluran perahu, mesin *katinting*, bantuan nelayan, dan sebagainya.

Akan tetapi, Rais diam-diam merasa bahwa ucapan Wisnu ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Malam harinya, saya dan beberapa orang Yayasan Toloka agak terkejut ketika mengetahui Rais ternyata justru mempersoalkan ucapan Wisnu. Kepada Hamid, Rais mengadukan perihal pernyataan Wisnu sebagai sebuah bentuk penghinaan terhadap orang Bajo. Saya dan beberapa orang lainnya yang ada di kantor Toloka ketika itu hanya memperhatikan Rais dan Hamid berbincang soal hal tersebut. Hamid, yang kebetulan tak hadir saat lokakarya hanya menerima laporan dan keluhan Rais. Saya mendengar bagaimana Rais berbicara tentang ‘torang’ atau ‘kita’ pada Hamid yang juga suku Bajo. Alih-alih mendapat simpati dan dukungan, Rais justru mendapat kecaman dari Hamid yang menuding Rais sebagai pengecut karena tak langsung memberi reaksi keras atau protes saat Wisnu mengucapkan kalimat di atas. Hal mendasar yang dipersoalkan Hamid dan Rais adalah soal ucapan Wisnu yang menyebut orang Bajo sebagai ‘bodoh’. Sedangkan pelabelan oleh Wisnu bahwa orang Bajo adalah perusak terumbu karang seakan bukan persoalan utama bagi mereka berdua.

Selama saya berada di kepulauan Togean, sikap-sikap yang mengaitkan suku Bajo dengan teknik penggunaan bahan peledak atau racun sianida untuk mengambil hasil laut bukan terjadi saat lokakarya itu saja. Di kepulauan Togean, kedua teknik tersebut dikenal dengan sebutan babom dan babius, berasal dari kata mem-bom dan mem-bius. Pemberian label terhadap orang Bajo sebagai pelaku babom dan babius ternyata dipahami pula di luar konteks kepulauan Togean.

Pada bulan Agustus 2004, saya diminta mempresentasikan makalah tentang kegiatan konservasi terumbu karang oleh orang Bajo di Kabalutan dalam sebuah seminar yang diselenggarakan LIPI di Jakarta. Usai menyampaikan makalah, Anugerah Nontji, salah seorang ahli Oseanologi LIPI yang cukup dikenal dan ikut dalam proyek COREMAP, bertanya pada saya: mengapa orang Bajo selalu terlibat dalam kegiatan pemboman dan pembiusan ikan? Ketika itu Nontji juga menceritakan bahwa hampir di setiap lokasi di mana program COREMAP dilakukan, ia menemukan adanya ketelibatan orang Bajo dalam kegiatan pemboman dan pembiusan ikan tersebut. Bagi saya, Nontji tak hanya sekedar bertanya, namun secara implisit sedang melakukan generalisasi atas beberapa realitas yang selama ini dialami dan dipahaminya sebagai sebuah relasi antara praktek perusakan terumbu karang, dalam hal ini pemboman dan pembiusan ikan, dengan identitas etnik Bajo.

Dalam sebuah artikel, Mark Erdmann menuliskan bahwa kegiatan perusakan terumbu karang memiliki kaitan erat dengan kelompok etnik, salah satunya adalah orang Bajo.

Although destructive techniques are practised throughout Indonesia, certain ethnic groups seem particularly partial to the use of DFP. These groups include the Bugis, Bajo and Makassarese of Sulawesi, and the Madurans of NE Java. Representing the strongest sea-faring traditions in Indonesia, these four groups range widely throughout the archipelago, occasionally travelling over a thousand kilometres from their homes in search of under-exploited reefs. This extreme mobility results in two important characteristics of DFP in Indonesia: 1) Paradoxically, the most remote reefs in Indonesia are often the most destroyed; and 2) As these fishers are not bound to a 'home' reef system, they are never forced to deal with the destruction they bring to bear. Rather, as one reef system becomes unproductive, they simply move on (Pet-Soede and Erdmann 1998: 43).

Bagi Celia Lowe, analisis Pet-Soede dan Erdmann merupakan bentuk dari politik identitas, setidaknya pada kelompok gerakan konservasi alam, yang

memandang komunitas-komunitas etnis dalam konteks penerapan konsep-konsep 'pembangunan' dan 'modernisasi' di Indonesia. Lowe menuliskan sebagai berikut:

In the Togean Islands, all ethnicities practice live fishing but Sama people are presumed to be the most engaged with cyanide use. This perception is related to the politics of ethnic representation in Indonesia. In the first place, Sama peoples are inaccurately thought of as 'sea peoples' (orang laut) or 'sea nomads' and, thus, both traders and conservationists have concentrated their energies on Sama communities. While traders have sought out Sama people for their fishing knowledge, conservationists presume just the opposite, that fishers are ignorant of coral reef biology and the damage they are doing to reefs. Togean Islanders, in general, are also thought of as 'suku terasing,' a term meaning ethnic groups alien to, or left behind in, the process of national modernisation. These simplifications of Togean identities and practices have made local Togean fishers, especially Sama fishers, easy to blame for cyanide use. (Lowe 2002: 8).

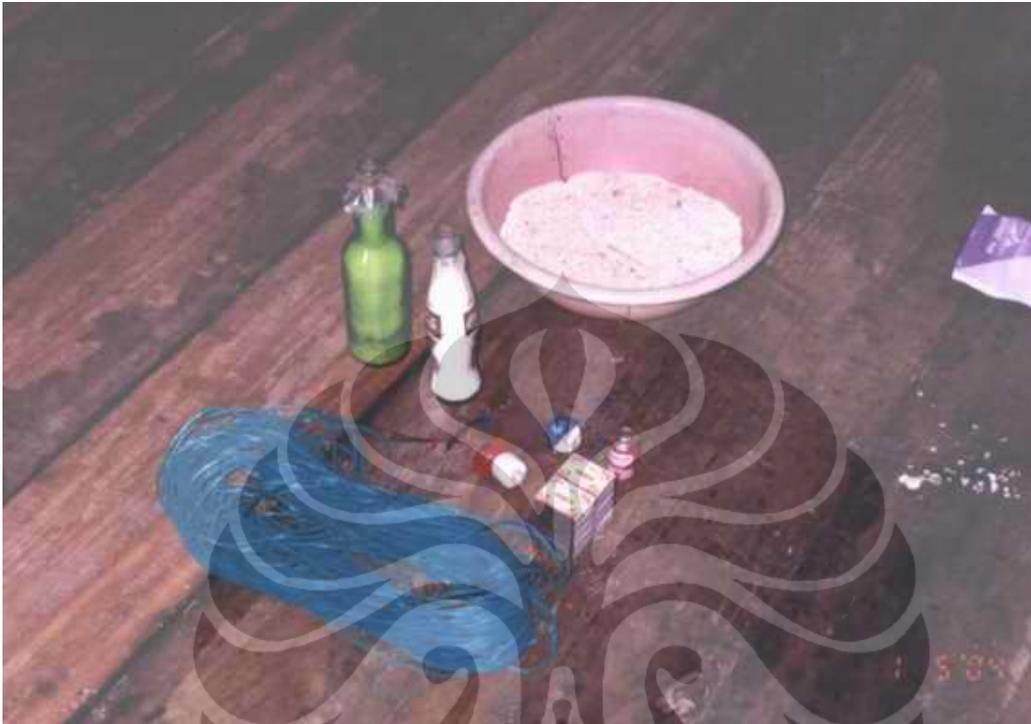
Saya memahami kesimpulan Pet-Soede dan Erdmann sebagai sebuah generalisasi atas beberapa kasus yang mereka amati. Di sisi lain, tanggapan Lowe yang meletakkan politik identitas terhadap Bajo dalam konteks konservasi alam sebagai hasil dari peran kekuasaan dalam pembentukan pengetahuan tentang identitas etnik, dalam hal ini referensi-referensi tentang suku Bajo atau Sama sebagai 'orang laut', 'orang nomaden', 'suku terasing'. Argumentasi Lowe dalam beberapa sumber cukup konsisten menjelaskan bagaimana proses relasi kekuasaan (*power relation*) dan pengetahuan (*knowledge*) ini mempengaruhi cara pandang orang lain tentang orang Bajo atau Sama' (Lowe, 2006; 2002).

Akan tetapi, sejauh pemahaman saya selama berada di kepulauan Togean, saya tak bisa mengabaikan realitas bahwa beberapa penduduk di kepulauan Togean juga mengaitkan babom dan babius ini dengan nelayan-nelayan dari suku Bajo. Penjelasan bahwa relasi kekuasaan sebagai sebuah faktor yang ikut membangun identitas Bajo agaknya perlu dipandang pada level berbeda manakala proses konstruksi identitas tersebut ditarik lebih dalam pada konteks relasi sosial di antara sesama orang Bajo (Kabalutan), maupun di antara orang Bajo dengan duku atau penduduk desa lainnya di kepulauan Togean. Pada beberapa kasus, penduduk kadang menyebut secara terus terang bahwa orang Bajo adalah pelaku babom dan babius. Meski tak secara tegas menyebut etnis, mereka kadang menyebut beberapa nama desa seperti Panabali, Kabalutan, Milok, Siatu, Pulau Salaka, Kulinkinari, atau Pulau Anam sebagai pemukiman nelayan yang biasa menggunakan bahan peledak dan

racun sianida untuk menangkap hasil laut. Meski pada beberapa desa juga ditemukan orang-orang bukan Bajo yang menggunakan teknik tersebut, hal ini tak menghapuskan pendapat penduduk soal Bajo seperti di atas.

Apa yang saya alami ketika berada di desa Tumulawa mungkin dapat memberi gambaran lebih jelas tentang pembentukan identitas sosial yang pada tingkat lokal terjadi antarkomunitas di kepulauan Togean ini. Tumulawa dikenal sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang suku Bobongko. Bahasa Bobongko digunakan hampir dalam setiap komunikasi di antara penduduk desa. Sebagian warga di sana ada yang secara rutin melakukan babom dan babius. Pada sebuah kesempatan saya menginap di rumah orang Bobongko di Tumulawa. Di dalam dapur rumah, saya melihat beberapa botol *Sprite* berwarna hijau yang padat terisi bubuk warna putih (saya menduga adalah pupuk) berjajar, berdekatan dengan satu kotak besar *macis* atau korek api, serta gulungan-gulungan kertas timah bekas bungkus rokok yang akan dijadikan *dopis* (sumbu detonator). Pemilik rumah, yang adalah pemilik barang-barang tersebut, secara terbuka mengakui semua itu adalah bahan-bahan untuk merakit bom ikan. Di hadapannya saya mencoba membantah pandangan kebanyakan orang di kepulauan Togean tentang citra orang Bajo sebagai perusak karang karena ternyata orang Bobongko pun melakukan hal serupa. Informan ini pun mengakui bahwa beberapa orang Bobongko di Tumulawa memang sudah lama mengenal dan melakukan babom dan babius, namun ia mencoba meyakinkan saya bahwa mereka belajar kedua teknik ini, termasuk cara merakit bom ikan, dari orang-orang Bajo.

**Gambar 3. 2. Bahan pembuatan bom ikan**



Sumber: CII

### **3.2.1. Babom dan Babius dalam Berbagai Konteks**

Bagi orang Bajo di kepulauan Togean, atau setidaknya bagi Rais yang sering berjalan bersama saya, label orang Bajo sebagai pelaku babom dan babius bisa berada pada situasi-situasi yang dianggap sangat serius sehingga menimbulkan reaksi konfrontatif sebagaimana sikapnya terhadap ucapan Wisnu di atas. Namun kadang pandangan atau sikap orang lain terhadap suku Bajo seperti itu hanya dianggap sebagai sebuah lelucon sehingga tak menimbulkan reaksi keras dari mereka. Sekitar bulan Juni 2001, di desa Tumotok yang terletak di sisi laut, saya dan beberapa orang dari desa-desa lain menghadiri sebuah pertemuan sehari yang diselenggarakan RARE Pride Campaign. Topik pembicaraan ketika itu adalah soal pemboman dan pembiusan ikan karena memiliki kaitan dengan program RARE ini, yaitu konservasi terumbu karang di kepulauan Togean. Rais dan dua warga Kabalutan lainnya juga hadir dalam pertemuan ini. Saat rehat menjelang makan siang, Rais, saya dan beberapa peserta

dari desa lain duduk melingkar menunggu hidangan disiapkan. Diskusi tentang pemboman dan pembiusan ikan pun berlanjut manakala ketika beberapa orang dari desa lain menceritakan pengalaman masing-masing yang berhadapan dengan nelayan asal Kabalutan yang kebetulan babom dan *bius* di sekitar desa mereka. Rais yang berasal dari Kabalutan membuat beberapa pernyataan yang agak membela orang-orang Kabalutan. “Dorang itu harusnya lebih diperhatikan pemerintah. Harusnya pemerintah beri bantuan katinting, jaring, karamba supaya dorang te lagi babom. Saya so kurang apalagi, so banyak kase tau dorang depe resiko”, kata Rais.

Seketika, kami yang sedang berdiskusi dikejutkan oleh suara dentuman cukup keras. Salah seorang dari kami langsung mengidentifikasi suara tersebut adalah ledakan bom ikan yang diperkirakan lokasinya di perairan yang tak jauh dari dermaga desa Tumotok. Entah apa yang ada di kepala kami masing-masing, hampir seluruh mata kami ketika itu menatap Rais. “Sudahlah, orang Kabalutan memang itu...” kata Rais seketika sambil tertawa. Ia seakan memaknai tatapan orang-orang tersebut sebagai sebuah pertanyaan: siapakah yang melakukan pemboman tersebut? Apakah Rais mengetahuinya? Orang-orang yang tadi serentak menatapnya, termasuk saya, ikut tertawa melihat sikap Rais. Tatapan bersama kepada Rais seakan memberi makna pula bahwa Rais jauh lebih mengetahui perihal pemboman tersebut. Bagai sebuah kelucuan yang berlanjut, kami pun tertawa bersama ketika Latif, salah seorang peserta dari desa Matobiyai menggoda Rais dengan pertanyaan lain: “Pak Rais, itu kira-kira [bom] lempar apa bom kontak?”<sup>1</sup> Rais tak menjawab pertanyaan Latif, melainkan tertawa terbahak bersama yang lainnya, termasuk Latif. Mungkin ia merasa pertanyaan tersebut sebagai kelakar sehingga tak perlu dijawab. Apalagi

---

<sup>1</sup> Di kepulauan Togeon dikenal ada dua teknik pemboman ikan, yaitu teknik lempar dan teknik kontak. Teknik lempar adalah cara meledakkan bom berbentuk botol yang terisi pupuk dengan cara menyulut sumbu yang ada di bagian tutup botol dengan api atau bara rokok. Botol dilemparkan ke permukaan air laut di mana sekumpulan ikan terlihat dari atas perahu. Pada teknik kontak botol berisi bahan peledak diletakkan di sekitar kelompok ikan yang akan ditangkap. Pada bagian tutup botol dilengkapi pemicu berupa balon lampu ukuran kecil dan seutas kabel yang terhubung dengan baterai atau aki di atas perahu. Panjang kabel bisa mencapai 30 meter atau lebih. Seorang nelayan yang berada di permukaan air bertugas meletakkan botol tersebut dan memberi aba-aba. Nelayan di atas perahu akan menyambungkan kabel pada baterai atau aki hingga terjadi hubungan listrik pada bola lampu yang ada dileher botol. Percikan api dari hubungan pendek pada bola lampu akan mengakibatkan botol yang berisi pupuk tersebut meledak.

perbincangan ini terjadi di saat rehat sesaat sebelum kami menyantap makan siang. Di antara suasana seminar dan rehat makan siang di Tumotok atau antara Latif dari Matobiyai dan Wisnu dari pemda Poso, ternyata membentuk relasi-relasi sosial yang berbeda meski proses yang terjadi serupa, yaitu pengaitan orang Bajo dengan babom dan babius.

Bagi orang Bajo di Kabalutan, setidaknya beberapa dari mereka yang menjadi informan saya, predikat sebagai ‘tukang’ babom dan babius yang diberikan orang luar bukanlah realitas yang tak mereka sadari. Di tahun 2002, saat saya membantu program CII untuk kegiatan kampanye konservasi alam di 37 desa di kepulauan Togean, isu tentang pemboman dan pembiusan menjadi pembicaraan penduduk desa yang saya kunjungi. Mansyur, orang Bajo asal Kabalutan kebetulan ikut dengan saya di hampir setiap kunjungan ke desa. Ketika kami bermalam di sebuah rumah di desa Bambu, komunitas yang penduduknya mayoritas adalah suku Ta’, tuan rumah, bernama Om Ama, sempat berbincang dengan kami dan dua warga desa Bambu soal tema kampanye konservasi yang kami lakukan. Kami duduk membentuk lingkaran saling berhadapan satu sama lain. Dalam kesempatan itu saya memberi Om Ama sebuah poster bergambar ikan maming atau ikan Napoleon wrasse (*Cheilinus undulatus*). Di bagian bawah gambar terdapat beberapa baris kalimat yang mengajak masyarakat Togean untuk menjaga terumbu karang dan menghentikan pemboman dan pembiusan ikan.

Poster tersebut nampaknya telah memberi inspirasi bagi Om Ama untuk berkomentar. “Di sini dulu banyak ikan maming. Sekarang so kurang. So banyak orang babom di *rep* [karang atau *reef*] sini”, katanya sambil menunjuk ke suatu arah. Lokasi yang ia maksud adalah habitat terumbu karang yang ada di depan selat menuju desa Bambu. Dalam perjalanan menuju Bambu, perahu yang kami sempat kandas di lokasi tersebut. “Orang-orang dari mana yang biasa babom?”, tanya saya penasaran. “Orang Kabalutan”, kata tuan rumah dengan singkat. “Torang di sini jengkel betul kalau dorang datang babom di situ. Tapi torang takut juga bakejar [mengejar], lantaran takut dorang [pelaku babom] lempar depe bom ke torang”, kata Om Ama terdengar agak emosional. Aris, orang suku Bobongko asal Lembanato yang juga

menemani saya, secara tiba-tiba terkekeh sehingga menarik perhatian saya. Ia terlihat melirik Mansyur. Saya pun mengalihkan pandangan pada Mansyur yang tersenyum dengan kepala sedikit menunduk. Saya, Aris dan Mansyur sempat saling pandang dan tersenyum. Pikiran saya, mungkin juga Aris, ketika itu langsung mengkaitkan ucapan Om Ama dengan identitas Mansyur sebagai orang Bajo dari Kabalutan.

Saya, Aris dan Mansyur bukan kali ini menghadapi situasi seperti itu. Pada beberapa desa lain, ketika kami berkunjung dan membicarakan soal pemboman dan pembiusan ikan, tiap kali itu pula nama orang Bajo atau Kabalutan disebut sebagai pelakunya. Dalam diskusi seperti itu pula biasanya Mansyur selalu menunduk sambil tersenyum, demikian pula halnya dengan Aris. Kami seperti telah mempelajari konteks-konteks tersebut, meski pun terjadi di desa yang berbeda. Senyum Aris, sikap menunduk Mansyur, serta reaksi saya yang berusaha mengurangi 'rasa kurang nyaman' pada diri Mansyur akibat penyebutan Bajo dan Kabalutan, adalah simbol-simbol yang akhirnya kami pahami dan melahirkan reaksi yang agak serupa sebagaimana kami lakukan di desa Bambu tersebut. Tapi, saya memahami tuduhan Om Ama sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya tentang praktek babom dan babius. Hal ini akan sangat sulit muncul jika Om Ama tidak memiliki referensi pengetahuan tentang hal tersebut. Apalagi, Om Ama juga orang yang kerap mengail ikan-ikan yang hidup di terumbu karang.

Saya mencoba mencegah komentar selanjutnya dari Om Ama karena khawatir hanya akan membuat Mansyur semakin terpojok atau tersinggung. Saya hanya mencoba agar susana pertemuan kami tidak berubah menjadi tidak nyaman. Bagi saya, bagaimana pun Mansyur adalah teman baik. "Mansyur ini dari Kabalutan, Om", kata saya. Dengan mengatakan demikian, saya berharap Om Ama menjadi sungkan untuk berkomentar lebih banyak soal pemboman ikan yang dilakukan nelayan-nelayan dari Kabalutan. Sejak awal bertemu dengan Om Ama sore hari tadi, saya memang belum memperkenalkan Mansyur sebagai orang Bajo dari Kabalutan. Aris sendiri sudah mengenal Om Ama sebelumnya. Ia yang mengajak kami menginap di rumah Om Ama. "Oh...", kata Om Ama setelah mendengar ucapan saya. "Kamu orang biasa mengail super berapa *depa*?", tanya Om Ama pada Mansyur.

Percakapan yang terjadi antara Om Ama dan Mansyur kemudian justru tentang teknik mengail ikan karang. Tak sedikit pun mereka menyinggung soal babom dan babius. Saya agak lega melihat Om Ama dan Mansyur tampak berbincang hangat hingga saya dan Aris ikut terlibat pula dalam perbincangan mereka. Saya merasa Om Ama seperti mencoba menggali pengetahuan Mansyur soal teknik-teknik mengail ikan karang. Bahkan, setelah makan malam, Mansyur pamit pada saya untuk pulang ke Kabalutan mengambil peralatan pancing dan akan kembali esok pagi. “Torang mau mangail di *rep* Bambu besok, mas Jaya”, kata Mansyur. Yang ia maksud dengan torang adalah dirinya dengan Om Ama. Tak lama kemudian Mansyur pun bergegas pergi untuk menghindari angin kencang yang biasanya semakin besar saat malam hari. Esok harinya, menjelang siang sepulang bertemu dengan guru dan murid-murid SDN Bambu, saya mendapatkan Om Ama dan Mansyur sedang membelah beberapa ekor ikan karang di dapur. Saya melihat ada dua ekor kerapu super, dua ekor sinurang, dan beberapa ikan kecil jenis babara atau kakap. Mansyur setengah berbisik pada saya: “*Beeh*, masih banyak depe ikan, mas. Kalau sampai tengah hari mengail pasti lumayan [hasilnya]”. Saya tak mengetahui persis bisikan Mansyur tersebut, apakah hanya sekedar ungkapan senang yang dirasakannya, atau Mansyur sedang berusaha membantah pendapat kebanyakan orang, termasuk komentar Om Ama tadi malam, bahwa pemboman atau pembiusan akan merusak terumbu karang sehingga ikan sangat sulit didapat.

Ketika membaca kembali peristiwa antara Mansyur dan Om Ama ini, saya berpikir tentang seberapa jauh predikat yang diberikan orang luar tentang orang Bajo (Kabalutan) sebagai perusak terumbu karang dengan relasi-relasi sosial yang terjalin di antara mereka. Awalnya Om Ama secara emosional menyalahkan orang Kabalutan sebagai penyebab kerusakan karang di *rep* Bambu sehingga ikan yang ditangkap nelayan Bambu makin berkurang. Akan tetapi, relasi sosial yang kemudian terjadi antara Om Ama dan Mansyur tak bisa dilepaskan dari konteks interaksi sosial mereka.

Orang Bajo di Kabalutan mengakui bahwa penggunaan bahan peledak dan racun sianida sudah dikenal dan dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Bom ikan dibuat

di rumah-rumah penduduk yang dalam perakitannya kadang melibatkan nelayan, isteri dan anak-anak mereka, atau kerabat-kerabat dekatnya. Deskripsi Celia tentang bagaimana teknik pemboman dan pembiusan bagi orang Bajo di Kabalutan memberi gambaran tentang sejauh mana kedua teknik ini diletakkan dalam kehidupan ekonomi mereka, juga dalam konteks yang lebih luas sebagai sebuah respon terhadap jaringan pasar global dalam perdagangan ikan karang hidup (*live-reef fish trade*).

Bagi sebagian nelayan di Kabalutan, babom dan babius lebih terkait dengan persoalan perebutan atas sumberdaya ikan di antara mereka, ketimbang efek kedua cara ini terhadap konstruksi pencitraan oleh orang lain terhadap Bajo. Sebagian orang Bajo di Kabalutan menyampaikan sikapnya pada saya tentang pengaruh babom dan bius yang dilakukan oleh kerabat, tetangga, atau teman mereka sesama Bajo di Kabalutan terhadap hasil tangkapan ikan mereka. Puah Ilong (almarhum), seorang tua yang sering mengeluhkan penyakit di badannya pada saya, pernah berkata: “Kalau saya masih muda, saya sudah ikut juga babom...dorang ini tidak cuma jeriken, tapi barangkali sudah drum racun [sianida] yang dorang curah ke laut”. Saya memahami komentar ini sebagai sebuah hiperbola yang sarkastis, di mana kejengkelan Puah Ilong tentang makin banyaknya orang Kabalutan yang menangkap ikan dengan menggunakan racun sianida. Beberapa kali sepulang mengail, Puah Ilong mengeluh pada saya soal hasil tangkapan ikannya yang semakin sedikit. Tiap kali pula ia menyalahkan orang-orang Kabalutan yang babom atau babius yang menyebabkan ikan semakin sulit ditangkap hanya dengan kail.

Sikap yang cukup konfrontatif bahkan pernah disampaikan Mbo Aiba (almarhum) dalam sebuah pertemuan desa Kabalutan yang membahas masalah babom dan babius ini. Saya dan beberapa orang desa yang hadir terkejut ketika tiba-tiba Mbok Aiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan suara cukup keras:”Kalo saya jadi *pongko*, so dorang-dorang ini dulu yang saya makan depe jantung”, sambil tangannya menunjuk beberapa lelaki yang duduk di barisan paling belakang. Saya mengenali orang-orang yang ditunjuk Mbok Aiba ini sebagai nelayan-nelayan yang biasa babom dan babius. *Pongko* adalah siluman jelmaan dari manusia yang sedang menuntut ilmu hitam. *Pongko* cukup diyakini keberadaannya dan

ditakuti orang-orang di kepulauan Togean karena senang menyantap jantung orang yang masih hidup, terutama yang sedang sakit. Mbok Aiba sendiri dikenal oleh orang Kabalutan sebagai *sandoh* atau dukun yang memiliki ilmu kebal dan mampu berkomunikasi dengan mahluk halus.

Dalam suatu kesempatan, Mbo Aiba bercerita pada saya soal sulitnya mengail ikan dalam beberapa hari belakangan ini. Ia mengisahkan bahwa dirinya kini harus semakin jauh mendayung *lepa* (perahu kecil dari kayu) untuk mencapai lokasi-lokasi mengail yang dianggap masih banyak ikan dan mudah ditangkap. “Dulu, cuma dekat-dekat saja dari kampung...di toroh Sidarawi, Sappa Matila. Mendayung sedikit saja, ikan so *bamakan* [makan umpan]. Sekarang, tempat-tempat itu sudah susah ikan. Orang-orang ini setiap hari babom babius di situ. Biasanya, ikan tak mau *bamakan* umpan torang kalo dorang habis babom atau babius”, tutur Mbok Aiba. Di tengah keluahannya ia masih juga merasa beruntung karena tak menggunakan perahu mesin katinting, sehingga tak ada biaya untuk bahan bakar yang ia habiskan. Namun, dengan usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, ia merasa makin tak kuat mendayung terlalu lama dan jauh. Apalagi jika kemudian langit semakin gelap, pertanda hujan lebat dan angin kuat akan datang, ia akan semakin kesulitan mencapai rumah dengan cepat untuk menghindar karena tempatnya mengail menjadi lebih jauh.

Mbok Aiba, Puah Ilong, atau beberapa orang yang cukup lanjut usia di Kabalutan senang menceritakan masa lalu di Kabalutan, mengenang masa berlimpah ikan ketika mereka masih muda. “Bayangkan, yang namanya maming [ikan *Napoleon wrasse*] itu *babiru* [tampak berwarna biru dari atas permukaan laut]. Kalau torang bersihkan ikan, maming banyak berkumpul di bawah sini [laut di bawah lantai dapur yang terbuat dari bilah-bilah kayu]”, cerita Puah Ilong mengenang masa lalunya. Menurutnya, waktu itu babom sudah dilakukan, tapi orang Kabalutan belum mengenal teknik babius dengan potasium sianida, kecuali tuba. “nanti so datang itu penampung [ikan karang], orang mulai pakai bius. Yang pertama Akong, terus Suryadi. Dorang bikin karamba dekat kampung. Suryadi sekarang so pindah ke Pulo Papan” kata Puah Ilong.

Jim Cannon (1998) memperkirakan perdagangan ikan karang untuk kepentingan ekspor mulai masuk ke kepulauan Togean pada awal 90-an. Masuknya para penampung ikan karang ini disertai introduksi racun sianida oleh mereka pada nelayan setempat agar tangkapan ikan lebih cepat dan mudah. Salah seorang informan di Kabalutan memperkirakan akhir 80-an sebagai awal masuknya penampung ikan karang di Kabalutan. Mereka adalah para pengusaha dari luar Togean, sebagian WNI keturunan Tionghoa, yang memiliki relasi dengan para eksportir ikan karang di luar kepulauan Togean. Pada tahun-tahun berikutnya penampung lain bermunculan sejalan dengan makin banyaknya ijin usaha perdagangan ikan karang yang dikeluarkan pemda Poso. Tak hanya orang luar, beberapa penduduk Kabalutan kemudian juga menjadi penampung lokal dari nelayan setempat.

### **3.2.2. Puah Thalib: Proyek bagi penegak hukum**

Dari balik jendela kaca, saya melihat bayangan Asnah bergegas menuju pintu depan rumahnya. Sudah beberapa kali saya mengetuk pintu dan mengucapkan salam di muka rumahnya. Ketika pintu dibuka, nafas Asnah agak tersengal. “Saya kira bukan mas Jaya. Takut saya. Tapi dorang [tetangganya] teriak-teriak bilang itu mas Jaya yang datang, maka saya buka. Saya kira polisi...*beh* [wah], takut betul saya,” kata Asnah sambil mengelus dadanya dan menyuruh saya masuk. “Kemana Puah [Thalib]?”, tanya saya. “So itu, dia baru berangkat mencari teripang”, kata Asnah. Kami langsung menuju belakang rumahnya yang berbentuk panggung dan menghadap laut. Hampir semua rumah di Kabalutan memiliki bagian belakang berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu besar menancap pada dasar laut. Lantai selasar belakang rumah ini terbuat dari kayu-kayu bakau berdiameter sekitar 10-12 cm yang disusun berjajar. Tempat ini disebut *para para*, yang sesungguhnya digunakan untuk menjemur ikan garam. Dari *para para* ini saya bisa memandang laut, perbukitan di daratan Sulawesi, dan bagian belakang rumah-rumah penduduk lainnya. Sore itu terlihat beberapa perahu hilir mudik. Ada yang baru kembali dari mengambil air bersih. Beberapa jeriken dan drum-drum plastik berukuran besar yang

berisi air tampak memenuhi perahu mereka. Ada pula yang seperti baru kembali dari mencari hasil laut. Ada yang menggunakan perahu bermesin katinting maupun mendayung.

Tujuan saya ke rumah Puah Thalib adalah untuk menyampaikan sebuah surat dari Nani, anak perempuan mereka yang bekerja sebagai pengasuh anak sebuah keluarga di kota Palu. Nani adalah anak kandung Asnah yang pertama dari dua anaknya hasil perkawinan dengan almarhum suami pertamanya. Sedangkan Thalib, sebelum menikah dengan Asnah, telah memiliki 3 orang anak dari isteri pertamanya yang telah ia ceraikan. Ketiga anaknya tinggal terpisah dengan Thalib karena semuanya telah menikah. Thalib dan Asnah memiliki dua orang anak, yang terakhir baru saja berumur 1 tahun.

Umur Nani baru sekitar 16 tahun. Seperti dialami oleh kebanyakan anak-anak di Kabalutan, ia hanya menyelesaikan pendidikan di SD Kabalutan. Setelah itu, biasanya karena alasan biaya, Nani tak melanjutkan ke SMP, melainkan tetap di desa membantu Asnah mengurus rumah dan adik-adiknya. Surat yang baru dibaca Asnah adalah pemberitahuan dari Nani bahwa ia belum mau menikah dalam waktu dekat. Menurut Asnah, ia berharap Nani bisa pulang ke Kabalutan untuk beberapa hari karena ada seorang lelaki asal Bunta yang datang menemui Thalib dan Asnah untuk melamar Nani. Lelaki tersebut dan Nani sudah saling mengenal, dan ia berencana membawa kedua orangtuanya bertemu dengan Thalib dan Asnah. Nani, saat bertemu beberapa kali dengan saya di Palu juga bercerita soal rencana perkawinan ini. Namun, Nani masih belum mau menikah, ia masih ingin bekerja di Palu sebagai pengasuh anak. Untuk itulah ia menitipkan surat dan beberapa oleh-oleh dari Palu untuk Asnah. Ia memberitahu bahwa ia belum hendak pulang ke Kabalutan, kecuali saat hari raya Idul Fitri nanti.

“Kalau saya tidak terlalu memaksa Nani kawin, tapi saya juga butuh dia di sini jaga adiknya [adik tiri Nani yang baru 1 tahun]”, kata Asnah. Menurut Asnah, beberapa hari ini agak repot mengurus keluarga karena ada persoalan lain yang juga harus ia tangani, yaitu masalah hukum Thalib atas kasus pemboman ikan. Oleh karenanya, ketika saya datang dan mengetuk pintu rumahnya, ia menganggap saya

adalah polisi dari kecamatan yang akan menemui Thalib. “Saya lebih suka Thalib seperti ini sekarang. Cari teripang saja. Mas tahu? Saya selalu khawatir kalau dia sudah pergi babom. Kadang saya lihat-lihat ke laut, barangkali perahunya sudah datang apa belum. Kalau sampai sore belum muncul, hati saya was-was terus. Takut ada apa-apa”, kata Asnah.

Thalib dan Asnah adalah salah satu gambaran tentang bagaimana kehidupan sebuah keluarga nelayan di Kabalutan dan keterkaitan mereka dengan kegiatan pemboman ikan. Thalib adalah salah satu dari orang Bajo kelahiran Kabalutan. Ia sejak remaja sudah mampu merakit bom ikan, belajar dari pamannya yang sudah lebih dahulu melakukan babom. Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh beberapa wanita lain yang suaminya biasa babom ikan. Ada dua hal yang paling dikhawatirkan mereka, yaitu suami mereka tertangkap polisi dan jika suami mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, lumpuh atau meninggal dunia.<sup>2</sup>

Kasus hukum yang dialami Thalib saat ini adalah yang paling berat dialami Asnah dan Thalib. Beberapa kali Thalib dan kelompok babom yang ia pimpinnya tertangkap oleh polisi. Pada beberapa kasus, ia sempat dipenjara di kantor polisi Walea Kepulauan. Namun, ketika ia masih bekerja dengan seorang bos penampung ikan, masa tahanan yang ia jalani hanya beberapa hari saja karena bosnya menebus dirinya dan seluruh peralatan yang disita, termasuk perahu dan mesin katinting. Demikian pula ketika ia tidak terikat pada satu orang bos pun, saat ditangkap ia masih bisa dibebaskan karena membayar sejumlah uang pada polisi yang menanganainya. Jumlah uang yang ia bayar biasanya antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1 juta, tergantung negosiasi di antara mereka.

---

<sup>2</sup> Investigasi oleh Yayasan Toloka menyebutkan bahwa antara tahun 1992 hingga 1999, telah jatuh korban akibat pemboman dan pembiusan ikan sebanyak 310 orang. Pada tahun 2001 tercatat ada 16 korban, masing-masing enam orang lumpuh (dekompresi) dan 10 orang meninggal dunia (Radar Sulteng, 2002). Yayasan Toloka juga pernah mengajukan permohonan agar Dinas Perikanan Kabupaten Poso mengeluarkan SK untuk melarang penggunaan kompresor untuk menangkap ikan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus dekompresi akibat penyelaman dengan kompresor, sekaligus untuk mencegah terjadinya pemboman dan pembiusan. Ketika Dinas Perikanan mengeluarkan SK ini, beberapa nelayan di Kabalutan yang memakai kompresor untuk mencari teripang menyatakan protesnya.

Akan tetapi, masalah hukum yang kini dihadapinya berbeda dan dirasakan lebih berat, yang berawal ketika kelompok Thalib yang sedang *babom* mengalami kecelakaan di perairan sekitar Wakai, antara pulau Kadidiri dan pulau Toge. Saat itu sebuah bom yang ada di atas perahu mereka meledak akibat Thalib salah menghubungkan kabel detonator dengan baterai. Seharusnya, ia mengambil kabel yang terhubung dengan bom yang diletakkan di dalam laut. Akan tetapi, kabel yang ia 'kontak' justru terhubung dengan bom ikan yang ada di dalam perahu. Dua orang anaknya yang laki-laki langsung meninggal dunia, satu anaknya lagi yang kebetulan berada di laut sebagai pemantau ikan dan seorang keponakannya selamat meski mengalami cedera serius. Thalib sendiri mengalami luka-luka. Kecelakaan akibat salah menghubungkan kabel ini sudah kesekian kalinya saya dengar. Sebagian kejadian tersebut tak menyebabkan korban jiwa, tapi ada pula yang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Ketika ledakan menghancurkan perahu Thalib, anak dan keponakannya yang selamat serta Thalib masih mampu bertahan di atas laut. Mereka mencoba menyelamatkan dua kerabatnya yang sudah tak bernyawa. Thalib sendiri mencoba berenang mencapai pulau Kadidiri. Agak lama mereka mengapung di laut hingga akhirnya sebuah perahu nelayan yang sedang menuju Wakai menemui mereka dan membawanya ke Wakai. Dari Wakai, beberapa orang dan kepolisian pelabuhan segera menuju lokasi kejadian untuk menjemput dua korban yang meninggal.

Thalib mengaku pasrah ketika ia dibawa ke Wakai untuk mendapatkan pengobatan. Ia sudah memastikan bahwa kecelakaan ini akan langsung ditangani oleh kepolisian. Maka, setelah mendapatkan pengobatan, Thalib dan anak serta keponakannya langsung mendekam dalam penjara kepolisian karena dianggap melanggar hukum hingga menyebabkan kematian. Ia menjadi seorang tahanan dan kehilangan kedua anaknya. Ia juga kehilangan kompresor, perahu dan mesin katitingnya yang tenggelam. Setelah beberapa lama mendekam di penjara, berkat

---

<sup>3</sup> Kisah tentang kecelakaan ini diperoleh lewat wawancara dengan Thalib di Kabalutan, serta beberapa informan yang ada di Wakai. Insiden ini memang telah menjadi pembicaraan banyak orang di kepulauan Toge. Salah seorang anggota LSM lokal bahkan mengkaitkan kejadian ini dengan program konservasi yang dijalankan CII di Kabalutan. Ia menganggap konservasi yang dijalankan oleh CII, terutama dengan pengembangan DPL, tidak efektif karena tak sanggup membuat nelayan Kabalutan berhenti *babom* dan *babius* ikan.

uang jaminan yang dikumpulkan Asnah, Thalib beserta anak dan keponakannya diperbolehkan pulang ke Kabalutan. Khusus bagi Thalib, ia diwajibkan datang ke kepolisian sektor Una Una satu kali setiap minggu untuk melapor sementara menunggu proses pelimpahan perkara oleh jaksa ke Pengadilan Negeri Poso.

Pasca-penahanan ini ternyata bukan sebuah hal yang meringankan masalah bagi Thalib dan Asnah. Mereka merasa kian sulit mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan polisi dan kejaksaan. “Mas Jaya lihat sekarang, sudah tidak ada lagi harta saya. Termasuk itu perabot masak di lemari, sudah habis semua saya jual buat urus Thalib ke polisi”, cerita Asnah pada kesempatan lain saya mendatangi rumahnya. Masalah ini menimpa keluarga Thalib, saya mengetahui mereka memiliki satu pesawat TV, VCD player, parabola, dan generator atau genset untuk penerangan. Hampir tiap malam, rumah Thalib ramai dengan anak-anak atau orang dewasa yang menonton televisi atau film dari VCD player. Setiap penonton dikenai biaya sebesar Rp. 500,-. ‘Bioskop’ rumahan seperti ini umumnya ditemukan pula pada beberapa rumah yang memiliki TV dan VCD player. Kepala desa bahkan melihat ‘bioskop’ ini sebagai peluang bagi pendapatan desa. Pemerintah desa pun mengeluarkan peraturan tentang pungutan desa, salah satunya adalah pungutan terhadap tontonan VCD di rumah penduduk yang besarnya Rp. 5.000 per bulan untuk setiap rumah.

Saya juga pernah melihat berbagai jenis perlengkapan rumah tangga seperti satu set panci bersusun warna putih, bermacam bentuk gelas dan piring keramik dengan hiasan yang tersusun sebagai pajangan di dalam lemari kayu berkaca yang diletakkan di ruang tamu. Pemandangan dan kepemilikan barang-barang seperti itu juga saya temukan pada beberapa rumah di Kabalutan, sebuah keluarga yang dianggap cukup mampu secara ekonomi. Dinding rumah mereka terbuat dari semen dan atap rumah dari seng, meski sebagian, biasanya pada bagian belakang rumah, lantai dan dindingnya masih berupa kayu dan atap *kajang* atau anyaman daun sagu.

Asnah memperkirakan jumlah uang yang telah ia keluarkan mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Semua itu untuk menjamin bahwa kasus Thalib tak dilimpahkan ke pengadilan dan ia tetap berstatus wajib lapor. Lebih jauh Asnah berharap Thalib dapat bebas begitu saja sebagaimana beberapa pelaku pemboman lainnya yang

pernah ditangkap. “Untuk pak Saiful [salah seorang penegak hukum] saja mungkin sudah habis 8 juta”, kata Asnah. Uang-uang tersebut diserahkan tiap kali Thalib menjalankan wajib lapor di Wakai. Saya sempat memperhatikan seuntai kalung melingkar di leher Asnah dan beberapa gelang di lengannya. Saya tak tahu apakah itu emas asli atau imitasi, saya hanya merasa tak terlalu sopan untuk menanyakan hal itu. Saya berpikir, barangkali perhiasan tersebut salah satu simpanan Asnah yang tersisa.

Ketika saya datang mengantar surat dari Nani, Thalib sudah beberapa minggu tidak menjalankan wajib lapor di Wakai. Menurutnya, uang sudah habis. Ia tak bisa lagi ke Wakai dengan membawa uang. Jika itu tetap ia jalankan, ia khawatir kepolisian akan menangkapnya lagi dan memasukkannya ke dalam penjara. Selama menjalani status wajib lapor, Thalib sudah tak lagi melakukan pemboman ikan. Ia hanya *balobe* mencari teripang dengan beberapa nelayan lainnya, atau menjaring ikan lolosi. Uang hasil penjualan teripang atau lolosi ia gunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, sisanya ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk biaya yang dibutuhkan selama proses hukum ia jalani, termasuk untuk membeli bensin mesin katinting yang digunakan antara Kabalutan-Wakai pulang pergi.

Sudah beberapa kali polisi atau jaksa mendatangi rumah Thalib selama Thalib tak lagi menunaikan kewajibannya melapor. Seringkali, Asnah lah yang menerima oknum penegak hukum tadi di rumahnya, baik karena Thalib kebetulan sedang menjala ikan atau sengaja bersembunyi. “Kalau ada uang, biar berapa saya kasih. Seratus, dua ratus [ribu rupiah]...tapi kalau tidak ada, mau kasih apa? Kalau ke sini, macam-macam saja dorang bilang...sedang butuh inilah...butuh itulah”, kata Asnah menceritakan apa yang ia lakukan saat menerima kedatangan polisi atau jaksa tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tahun 2006, saya mendengar kabar dari Nani bahwa Thalib telah meninggal dunia ketika melakukan pemboman. Kesalahan yang sama seperti di Wakai telah ia lakukan. Menurut Asnah, Thalib sesungguhnya tak lagi mau melakukan pemboman. Tapi, semakin lama Thalib makin membutuhkan uang karena kasus hukumnya tetap berlanjut. Penghasilan dari mencari teripang dan menjaring ikan dianggapnya kurang memadai dan lambat mendapat hasil dibanding menggunakan bom. Saat kunjungan ke Kabalutan tahun 2008, Nani sudah menikah dengan lelaki yang ditawarkan Asnah. Perkawinan mereka tak dihadiri Thalib. Asnah berharap Nani dan suaminya yang kini tinggal di Kabalutan akan mengurangi bebannya mengurus keluarga. Saya menghaturkan doa untuk Thalib.

Masih ada beberapa nelayan lain yang mengalami hal seperti Thalib di Kabalutan. Relasi-relasi yang terbangun antara para pelaku pemboman dan pembiusan ikan di Kabalutan dengan para petugas keamanan adalah bentuk hubungan yang tidak sederhana. Bukan sebuah hubungan yang bergerak pada wilayah hukum formal, antara ‘petugas’ hukum dengan ‘tersangka’. Hubungan mereka adalah relasi-relasi yang dijalin melalui konstruksi sosial tentang babom atau babius itu sendiri. Bagi (oknum) polisi, jaksa, atau mereka yang bertugas menjalankan peraturan atau undang-undang, babom dan babius adalah sebuah proyek ekonomi mereka. Peristiwa pemboman dan pembiusan adalah jalan masuk bagi mereka untuk melakukan sebuah pertukaran (*exchange*) dengan siapa saja yang dianggap sebagai pelaku pemboman dan pembiusan. Bagi nelayan pelaku pemboman dan pembiusan, oknum-oknum tersebut bisa menjadi bagian dari mereka yang pada saat tertentu dapat ‘menolong’ dari jeratan hukum formal.

Di antara pelaku pemboman dan pembiusan ikan, terbentuk pula persepsi tentang ‘polisi bagus’ dan ‘polisi tidak bagus’. Suatu saat, di rumah Sofyan, saya mendapat kesempatan berkumpul dengan beberapa orang asal Jaya Bhakti yang memiliki keterlibatan dengan praktek pemboman dan pembiusan ikan. Mereka adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sofyan. Satu di antara mereka adalah saudagar ikan karang yang juga menjadi pemasok tablet potassium sianida. Dua orang lainnya, adik kakak, lelaki dan perempuan, adalah pemasok pupuk merek Obor dan cap Matahari yang menjadi bahan baku pembuatan bom ikan. Ketika itu saya masih berkerja di CII, dan kami berbincang ringan dan ‘tanpa rasa curiga’ tentang pemboman dan pembiusan ikan. Beberapa botol bir *Anker* dan 1 botol *Mansion House* yang dibawa tamu dari Jayabhakti tersebut tersedia di atas meja, berdampingan dengan beberapa gelas berisi kopi hitam.

“Bagaimana mungkin orang babom bikin ikan habis. Ini sudah terjadi sejak jaman Jepang, Mas,” kata saudagar ikan. Orang ini memang yang paling aktif berbicara dibanding yang lainnya. “Kita ini babom babius lantaran masih banyak ikan. Laut luas begini, mana mungkin ikan habis. Itu urusan Tuhan”, katanya lagi.

Menghadapi komentar-komentar seperti ini, saat saya bekerja di CII, sudah sering saya hadapi. Biasanya saya hanya membiarkan mereka menyampaikan pendapatnya.

Hal yang menarik adalah ketika mereka berbincang tentang seorang polisi yang bertugas di kecamatan. “Dia so pindah kemari dari Bunta. Bagus itu orang. Tidak macam [mereka menyebut nama....]. Polisi jahat itu. Kalau ini [yang baru pindah] polisi bagus. Saya kenal dia,” kata saudagar ikan tadi. Ia menasihati Sofyan agar tak usah takut, dan menyarankan untuk menemuinya dan mengaku kerabat saudagar tersebut. “Baku tahu saja kalau orang babom atau babius ketemu dia di laut. Biasanya dia cuma angkat tangan, atau datang kasih tahu, torang jangan bawa-bawa nama dia kalau ada urusan dengan polisi lain”, kata saudagar itu lagi. Pujian mereka berikan pada ‘polisi baik’ sejauh hubungan kerjasama dan ‘saling mengerti’ bisa terjalin di antara mereka. Di tingkat penanganan perkara, sebuah jalinan institusional atau *institutional arrangement*, meminjam istilah dari McCarthy (2006), negosiasi dan konsensus antara pelaku pemboman atau pembiusan terjadi untuk menemukan bentuk-bentuk jalan keluar.

### **3.2.3. Puah Kandala: ‘Miskin’ tak harus babom**

Sebagian pelaku pemboman dan pembiusan ikan kadang menyampaikan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak dan merasa ‘miskin’ sebagai kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka babom dan babius. Tapi, Puah Said yang dikenal sebagai penampung ikan karang, mengomentari alasan tersebut sebagai sebuah kepura-puraan. “Mas kasih tahu saya siapa yang bicara begitu, biar saya kasih masuk pasir depe mulut. Saya cuma mengail, pak Ustadz mengail, banyak yang cuma mengail, balobe cari taripang, tetap hidup, bisa makan bisa merokok”, kata Puah Said agak emosional. Pak Ustadz, yang dimaksud Puah Said tadi, dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tropika* berkomentar bahwa justru babom dan babius lah yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi nelayan. “Dahulu ada hasil, tapi sekarang, mendapat ikan tidak baku tutup, tidak balik ongkos” (*Tropika*, 2004: 9).

Pengalaman saya saat berkunjung ke rumah Puah Kandala mungkin bisa memberi gambaran lebih dalam tentang pernyataan Puah Said dan Pak Ustadz tadi.

Stidaknya ada gambaran tentang nelayan-nelayan lain yang secara ekonomi seringkali tak mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, namun tak mau melakukan babom atau babius. Puah Kandala hidup dalam sebuah rumah kayu berukuran sekitar 4x4 meter yang seluruh dindingnya *pitate* [anyaman pelepah sagu] dan atap sirap dari anyaman daun sagu. Dalam rumah inilah Puah Kandala, yang mengaku berusia 40 tahun, tinggal bersama isterinya, dua anak kembar berusia 2 tahun, seorang anak perempuan usia 6 tahun, satu anak perempuan usia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas V SDN Kabalutan, serta anak tertuanya, lelaki usia 16 tahun.

Di dalam rumah hanya ada selembar sekat dinding *pitate* yang memisahkan antara ruang tidur mereka dengan dapur dan ruang tengah, jika mau disebut demikian. Dua buah *buei-buei*, selembar kain panjang yang kedua ujungnya diikatkan pada sebatang kayu diameter sekitar 10 cm yang digantungkan di atap rumah, terlihat di ruang tidur. *Buei-buei* digunakan sebagai buaian bayi atau anak kecil. Ada tali plastik menjulur dari ujung kayu penggantung *buei-buei*. Orang biasanya menarik-narik tali tersebut agar *buei-buei*, di mana anak atau bayi ditidurkan di dalamnya, bergerak naik turun. Suasana gelap dalam rumah karena cahaya masuk hanya melalui dua pintu yang tersedia, pintu masuk dan pintu belakang yang langsung menuju laut. Di bawah pintu belakang inilah terdapat tangga untuk turun ke laut atau menuju perahu yang terparkir di bawahnya.

Pada ruangan yang tampak seperti dapur, terdapat beberapa perlengkapan memasak, termasuk sebuah tungku batu. Persis di atas tungku terdapat tempat menyimpan kayu bakar. Setumpuk kayu bakar terlihat berjajar di dalamnya. Penyimpanan kayu bakar di dekat tungku memasak memang umum ditemukan di rumah-rumah penduduk di kepulauan Togean. Hal ini dilakukan agar lebih praktis dan menyebabkan kayu tetap dalam kondisi kering karena hawa panas. Atap di atas tungku agak berlubang agar asap dapat keluar, tapi ada lembaran sirap yang menjadi tutupnya pada saat hujan turun. Persis di sebelah tungku dan perlengkapan memasak dan makan, beberapa ember dan jeriken berisi air tersusun. Di dekatnya ada ruang kosong yang lantainya terbuat dari susunan batang-batang mangrove berdiameter sekitar 10 cm. Lantai tersebut berfungsi sebagai tempat mencuci piring sehingga air

langsung mengalir ke bawah menuju laut. Menempel pada dinding, menyatu dengan lantai mencuci piring, terdapat satu kandang berisi ayam. Semua tampak tercampur tanpa pemisah.

Di antara ruang tidur dan lantai mencuci piring itulah, suatu hari saya, Puah Kandala, dan isterinya duduk berbicara soal penyakit *sarampa* atau campak yang menyerang empat orang anaknya, termasuk dua anak kembar mereka. Ratna, anak perempuan usia 6 tahun, tampak terbaring di lantai kayu tanpa alas kepala. Fitri, anak perempuan yang berusia 12 tahun, berjalan keluar masuk rumah. Tampaknya ia sudah mulai sembuh. Dua anak kembarnya sedang menetek pada isteri Kandala. Satu di kiri, satunya lagi di kanan. “Sudah dibawa ke mantri?” tanya saya. “Belum, tapi sudah ditiup-tiup [diobati dengan mantera oleh sandoh atau dukun]”, kata Kandala. “Bawa saja ke mantri. Di rumah puah Kepala ada dokter-dokter dari kabupaten, mereka bilang anak-anak yang sakit langsung dibawa ke mantri, besok ada pengobatan gratis, jadi bawa semua ke sana”, kata saya menyarankan. “Mau lihat besok” kata Puah Kandala mengisyaratkan kemungkinan akan datang atau tidak datang. Anak kembar mereka berkali-kali meregekk dan tampak gelisah. Wajahnya memerah dan terdapat banyak bintik-bintik kecil. “Sandoh bilang kalau sedang panas begini jangan disuntik [diobati mantri]. Nanti sembuh sendiri, macam Fitri itu,” kata isteri Kandala sambil menunjuk Fitri yang sedari tadi merayu ibunya meminta uang untuk membeli sebungkus mie instan. Tapi isteri Kandala tak kunjung memberinya karena tak ada uang.

Esok sorenya, di tempat yang sama saya kembali bertemu Puah Kandala. Isterinya tampak menidurkan salah satu anak kembarnya, sementara yang satunya lagi tertidur dalam *buei-buei*. Seperti kemarin, dua anak ini hanya dililitkan selembar kain putih kusam pada bagian dada. Mereka tak menggunakan celana. Kemarin saya menyarankan isteri Kandala untuk memakaikan baju dan celana pada mereka. Rupanya saran saya tak dilakukan. Alasan isteri Puah Kandala, anak-anaknya tak mau dipakaikan baju karena *pedis* atau kulitnya perih terkena pakaian. Saya lihat Ratna tampak sudah duduk, juga tanpa mengenakan baju, hanya celana pendek. Dia hanya berdiam memperhatikan kami berbincang. Matanya tampak sembab, memerah dan

tampak mengeluarkan cairan. Saya mendatangi rumah Puah Kandala karena sepanjang hari itu tak melihat mereka mendatangi rumah Puah Kepala untuk pengobatan gratis. Saya hanya ingin tahu mengapa mereka tak datang.

“Mengapa tidak datang tadi. Dokter masih ada. Nanti malam pengobatan dilanjutkan. Mereka pulang besok pagi barangkali”, tanya saya sekaligus agak mendesak mereka untuk membawa anak-anaknya mengunjungi dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Puah Kandala dan isterinya hanya mengaku bahwa mereka repot membawa keempat anak-anak mereka berjalan ke rumah Puah Kepala yang berjarak lebih dari 500 meter. “Minta tolong mantri saja, biar saya yang panggilkan mantri”, kata saya. Namun, Puah Kandala dan isterinya menolak keras tawaran saya. Mereka bersikukuh bahwa pengobatan dari *sandoh* sudah cukup bagi anak-anaknya. Isteri Puah Kandala kembali menunjuk Fitri sebagai contoh. “Apa takut bayar? Kata dokter kabupaten, obat sudah dititip kepada mantri gratis”, kata saya lagi. Saya mulai mencurigai bahwa mereka khawatir tetap akan dimintai bayaran jika berobat. Pertanyaan-pertanyaan saya ternyata membuat Puah Kandala berkomentar, “Iya, tak ada uang saya. Biar saja”. Setelah saya desak dan memberi jaminan bahwa tak akan dipungut bayaran, akhirnya Puah Kandala meminta isterinya ke rumah Puah Kepala untuk meminta obat. Anak-anaknya dititipkan pada Puah Kandala dan saya.

Tak lama, Yudi, anaknya yang tertua muncul di pintu belakang rumah. Ia mengikat tali perahu pada anak tangga. Ia berhasil menangkap gurita, dan memperoleh uang Rp. 30.000,- hasil penjualan gurita yang telah dibagi rata dengan teman-teman kelompok menangkap gurita. Uang itu sepenuhnya milik Yudi. Ia kadang memberi sebagian pada Puah Kandala atau ibunya. Yudi meletakkan dua buah *cipou* kayu di sisi pintu, berjalan melintasi kami menuju dapur untuk minum. *Cipou* kayu adalah umpan tiruan berbentuk udang kipas yang digunakan untuk memancing gurita keluar dari persembunyiannya di balik karang. Kaki-kaki *cipou* kayu tersebut dibuat dari mata pancing yang disusun agar ketika gurita memakannya akan langsung terkait. “Ini kalau beli bisa Rp. 150.000. Orang-orang Tumotok biasa bikin, dijual di pasar [Kabalutan]. Tapi saya bikin sendiri ini”, kata Puah Kandala.

Selain menangkap gurita dan mengail dengan Yudi, Puh Kandala juga mencari penghasilan dengan menjual sagu dan daun sirih kepada para tetangga. Mengunyah sirih cukup digemari oleh orang-orang tua di Kabalutan. Dalam 1 minggu Puh Kandala bisa menjual hingga 20 hingga 30 ikat daun sirih yang masing-masing seharga Rp.1.000.-. Ia mengaku sebagai 'orang miskin'. Kehidupan ekonominya sangat bergantung pada kemampuannya mendayung perahu, berjam-jam menyelam menangkap gurita dan memancing ikan, serta *bapukul* sagu di hutan. Namun, ia tak mau sedikit pun mencoba untuk babom atau babius. "Saya takut, pak. Kalau mau belajar bisa, tapi buat apa. Memang hasilnya lumayan, tapi resikonya besar juga. Lebih baik tidak. Apalagi kalau ketangkap polisi, malah bikin pusing seperti teman-teman saya", kata Puh Kandala suatu ketika. Ia juga memberi contoh kasus yang menimpa almarhum Puh Thalib. Ia tak mau isterinya menjadi janda, berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya. Saya juga agak terkejut ketika Puh Kandala mengatakan bahwa satu bancu sagu kadang hanya 1 minggu saja habis untuk makan keluarganya. Selama ini saya tahu bahwa satu bancu sagu dalam sebuah keluarga bisa cukup untuk persediaan hingga 1 bulan. Keluarga di kepulauan Togeian biasanya mengkonsumsi sagu sebagai selingan dengan beras. "Kami hanya makan sagu, apalagi? Beras mahal", kata Puh Kandala.

Puh Kandala adalah salah satu nelayan di Kabalutan yang dipuji oleh Rais karena sikapnya yang tak mau ikut babom atau babius. "Ini orang bagus, mas. Biar hidup begini, tidak pernah dia babom. Yang begini banyak di kabalutan. Tapi, coba pemerintah lebih perhatikan dorang pe kehidupan. Jangan malah dikase bodo terus...", kata Rais ketika pertama kali saya berkenalan dengan Puh Kandala. Saya merasa masih ada perasaan tersinggung Rais terhadap ucapan Wisnu dari Dinas Perikanan Poso beberapa tahun lalu.

Kemiskinan, kebutuhan hidup yang mendesak, atau alasan-alasan ekonomi keluarga merupakan faktor-faktor yang memang masih digunakan ketika para nelayan yang babom dan babius ditanya alasan mereka melakukan kedua cara menangkap ikan tersebut. Puh Said, Rais, atau Puh Kandala bisa memberi gambaran empirik

yang mungkin berbeda tentang hubungan antara kondisi ekonomi nelayan dengan praktek babom dan babius.

Bagi Puah Sofyan, alasan ekonomi juga sempat ia bantah. “Saya dulu ini tukang babom. Tahu betul depe seluk beluk. Saya juga tahu polisi-polisi yang suka ‘makan’ uang itu. Saya ini ibaratnya ‘bendahara’ kelompok babom. Saya bagian kumpul-kumpul uang dari nelayan yang babom, terus setor ke Pak X [seorang polisi kecamatan yang sering datang dan menginap di Kabalutan]. Makanya, waktu saya pensiun, dorang itu te ada lagi yang berani macam-macam dengan saya....Waktu dulu, uang ada terus, Pak. Tapi, begitu saja habis. Paling buat makan sehari-hari. Kebanyakan habis buat minum, main judi...sama polisi-polisi itu juga. Coba itu lihat Puah Karim, kurang apa dia, tapi tak mau berhenti babom sampai sekarang. Di rumahnya, ada terus Pak X di sana”, ucap Puah Sofyan mengenang masa lalunya.

#### **3.2.4. Puah Karim: Selalu memberi ‘pisang’**

Yang disebut Puah Karim oleh Puah Sofyan adalah ‘jendral’ lainnya di Kabalutan. Tubuhnya tegap, agak gempal, kulit berwarna gelap, dan sangat pendiam. Saya pernah mendatangi rumahnya suatu ketika. Ketika itu, kami berbincang di dapur belakang rumahnya. Ada beberapa botol minuman ringan berbahan kaca, satu karung plastik berisi pupuk cap Obor, dan beberapa kotak korek api. Kabel ukuran kecil berwarna merah, hitam tampak terurai tak beraturan di lantai kayu. Sambil berbincang Puah Karim sibuk memasukkan pupuk ke dalam botol, memukul-mukul ujung leher botol agar pupuk lebih padat di dalam. “Kalau padat depe ledakan lebih hebat”, kata Puah Karim. Sebelum dimasukkan botol, pupuk tersebut digoreng tanpa minyak agar kering pada kual. Isterinya, yang bertubuh agak gemuk, mendapat tugas menggoreng pupuk tersebut. Menurut Puah Karim, pupuk diperoleh dari seorang penampung ikan asal Jaya Bhakti. Orang tersebut datang untuk mengambil ikan yang diperoleh dari babom, sekaligus pula mengantar pesanan pupuk untuk Puah Karim. Praktek jual beli pupuk seperti ini sangat dilarang dalam peraturan pemerintah. Namun, di Kabalutan, saya cukup mudah memperoleh informasi tentang hal ini.

Ada rasa takut yang amat sangat ketika saya duduk dekat Puah Karim yang dengan tenang mengisi botol-botol *Sprite* dengan pupuk. Masalahnya, ia melakukan itu sambil menghisap rokok bagai tak pernah berhenti. Apalagi ketika ia mulai membuat denotator yang terbuat dari bola lampu kecil dan kertas timah sebelum disambungkan dengan seutas kabel. Botol-botol bom yang telah dibuat ia jejerkan di dekat dinding kayu di sebelahnya. Saya hanya membayangkan apa yang terjadi jika kemudian arsi api memercik dari rokoknya dan menyulut dopis (detonator) salah satu botol. Beberapa cerita tentang kecelakaan dalam pembuatan bom ikan ini sudah saya dengar. Pernah, ada seorang anak yang jarinya terpaksa diamputasi karena bom yang terbuat dari botol Krating Daeng meledak di dekatnya. Ia ketika itu sedang meniru ayahnya yang sedang merakit bom ikan. Tapi, melihat Puah Karim terus saja merokok, saya hanya bisa menahan ketegangan tersebut sambil mencoba se-rileks mungkin berbincang dengannya.

Di banding dengan Puah Kandala, bahkan Puah Sofyan sekalipun, kehidupan ekonomi Puah Karim dapat dikatakan jauh lebih baik. Ia memiliki TV dan parabola, DVD player, tape compo lengkap dengan *speaker*, rumah yang luas berlantai semen dan atap terbuat dari seng, serta dua buah mesin generator listrik. Perahunya berukuran cukup besar, dengan panjang sekitar 10 meter yang dilengkapi dengan motor tempel merek Yamaha berkapasitas 25 PK. Saat saya berkunjung ke rumahnya, saya menyampaikan sebuah titipan kalung emas seberat 10 gram dari seorang kerabatnya yang tinggal di Palu. Kalung tersebut memang sengaja ia titip pada kerabatnya tersebut karena isterinya selalu meminta dibelikan kalung emas yang dijual di Palu. “Maklum, perempuan. Katanya di Palu lebih bagus. Padahal sama saja dengan di Pagimana,” kata Puah Karim saat menerima dan memperhatikan kalung yang saya serahkan. Ia memanggil isterinya, dan memberikannya begitu saja tanpa menoleh, kecuali saat meminta dibuatkan teh manis untuk saya.

Tak ada yang tidak mengenal Puah Karim sebagai ‘bos’ di Kabalutan. Pujian kadang terlontar dari beberapa penduduk di Kabalutan tentang kemampuan ekonominya. Di kalangan para pelaku pemboman, Puah Karim dipuji karena kemampuannya mengendalikan oknum polisi di kecamatan. “Biar polisi baru, kalau

ke Kabalutan pasti ke rumah Puh Karim dulu”, kata seorang warga. Soal ini, Puh Karim pernah agak berseloroh mengatakan: “Yang penting rajin kasih ‘pisang’, Pak. Kalau tak ada ‘pisang’ mana bisa mereka [oknum polisi] makan. Kalau tidak makan, kita juga yang ikutan susah”.

Penduduk juga menilai Puh Karim sangat senang menunjukkan bahwa dirinya memiliki banyak uang. Hal ini terutama dilakukan saat ada kerabat dekatnya yang mengadakan pesta pernikahan atau khitanan. Suatu sore saya pernah menghadiri acara pernikahan keponakan Puh Karim yang dilakukan di sebuah tanah lapang persis di muka rumahnya. Bersama Rais, saya menuju ke rumah Puh Karim untuk memenuhi undangannya. “Nanti mas Jaya lihat. Biasanya Puh karim kase kalung ke penganting, kalung dari uang yang disusun-susun”, kata Rais saat kami berjalan beriringan.

Tadi siang, saya telah menghadiri acara intinya, yaitu pengajian dan akad nikah. Ketika mempelai lelaki datang ke rumah mempelai perempuan, sepanjang jalan ia diiringi musik rebana atau *marwas* yang pemainnya adalah orang-orang tua di Kabalutan. Hal yang menarik adalah, dalam iringan seperti ini, biasanya pada waktu dan tempat yang tak terduga, anak-anak atau remaja menyulut beberapa ‘mercon’ yang terbuat dari botol-botol kaca berukuran sangat kecil, seperti botol minyak angin. Anak-anak atau remaja itu merakitnya sendiri dengan cara dan bahan yang serupa dengan pembuatan bom untuk menangkap ikan. Beberapa kali saya sangat terkejut mendengar ‘mercon’ yang tiba-tiba meledak. “Awas...Krating Daeeng”, seseorang berteriak di belakang saya. Saya langsung menutup telinga kuat-kuat. ‘Krating Daeng’ adalah jenis ‘mercon’ yang ukurannya lebih besar karena terbuat dari botol minuman energi. Saya sangat takut membayangkan suara ledakannya yang pasti jauh lebih mengagetkan dari ‘mercon’ botol minyak angin. Rais hanya terkekeh melihat saya ketakutan dan menyusup ke tengah rombongan. Beberapa orang lainnya juga mengolok-olok saya. Tak ada satu pun orang dalam rombongan ini yang tampak ketakutan atau marah, kecuali saya barangkali. Semua seperti tak terpengaruh, kecuali tertawa dan berteriak-teriak. Pengantin terus berjalan di depan dengan wajah tegang,

pemain *marwas* terus saja bernyanyi dan bersemangat menepuk rebana ditangan mereka, sementara orang-orang yang mengiringi pengantin pria ikut bernyanyi.

Pada saat pesta sore hari itu, di muka rumah Puah Karim, sebuah tenda cukup besar telah berdiri, kursi-kursi plastik yang dikelola kelompok PKK juga telah berjejer, dan banyak tamu telah duduk di hadapan pelaminan. Di pelaminan, saya melihat kedua pengantin telah duduk seakan tak bergerak. Pengantin perempuan menggunakan gaun warna putih yang terbuat dari kain satin yang berkilau, sementara mempelai lelaki menggunakan stelan jas dan celana warna hitam, kemeja warna putih yang dilengkapi dasi, serta sekuntum bunga warna merah disematkan pada dada bagian kirinya. Ini menyerupai gaun pengantin ala Barat atau yang banyak digunakan di perkotaan.

Di sebelah kiri pelaminan, berjarak sekitar 5 meter, ada sebuah panggung cukup besar yang dibelakangnya berjejer beberapa buah speaker berwarna hitam. Suara musik yang dibawakan oleh kelompok musik dari Manado terdengar keras dari speaker. Tak jauh dari speaker tersebut, sebuah organ, dua buah gitar listrik dan drum telah ditata. Peralatan musik tersebut adalah milik penduduk Kabalutan yang tergabung dalam grup band Tiga Dusun. Pada bagian panggung telah disediakan dua buah mikrofon yang berdiri tegak. Pertunjukan musik, baik band atau organ tunggal, sangat umum diselenggarakan pada acara-acara pernikahan tersebut. Saya menikmati betul suasana riuh dan gembira ini. Beberapa tamu, yang kebanyakan adalah orang Kabalutan, berdatangan dan langsung duduk di kursi pelastik. Sebagian lainnya hanya berdiri di sekitar tempat duduk, atau di muka rumah mereka. Anak-anak bermain dan berteriak-teriak. Beberapa orang Kabalutan, yang biasanya saya kenali hanya mengenakan sarung atau celana pendek tanpa baju, tampak lain dari biasanya karena kini mengenakan batik atau kemeja lengan panjang. Tamu-tamu perempuan ada yang berpakaian baju muslim, kebaya, atau baju kurung. Rata-rata menggunakan jilbab atau penutup kepala.

Setelah kepala desa memberi kata sambutan, dan grup band Tiga Dusun memainkan beberapa buah lagu dangdut, pembawa acara tampil ke atas panggung. Sedari tadi saya tak melihat Puah Karim. Barangkali ia masih ada di dalam rumah.

Pembawa acara, atau ‘pengacara’ menurut orang-orang di sana, mengucapkan selamat pada pengantin dan mengumumkan pada peserta bahwa acara bersalaman segera dimulai sebelum makan dan hiburan. Sebelum seluruh tamu bangkit untuk bersalaman, dari pintu depan rumah Puah Karim, sebelah kanan kursi pelaminan, Puah Karim muncul dengan peci dan batik. Ia hanya mengenakan sandal jepit. Semua orang bertepuk tangan, termasuk saya dan Rais. Di belakang Puah Karim, seorang perempuan muda memegang sebuah kalung besar berwarna merah. Itulah kalung terbuat dari uang kertas yang dimaksud Rais. Saya melihat lembaran uang kertas pecahan Rp. 10.000 di susun membentuk lingkaran dan dilekatkan satu sama lain, mungkin dengan *stapler* kertas. Ada dua buah kalung seperti itu. Saya tak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Beberapa uang kertas Rp. 50.000 tampak terselip di antara uang seluruh ribuan tersebut. Dengan tepuk tangan meriah, Puah Karim mengalungkan kalung uang kertas tadi ke leher kedua pengantin tersebut. Usai bersalaman, Puah Karim langsung masuk kembali ke dalam rumah lewat pintu yang sama. Saya sempat mendengar Rais berkomentar: “Coba mas lihat, bagaimana tidak enak kalau babom? Uang banyak, orang-orang di sini pikir juga begitu”. Usai Puah Karim dan isterinya bersalaman, seluruh tamu berbaris untuk ikut bersalaman dan dilanjutkan dengan menikmati hidangan yang disediakan di atas meja panjang. Musik kembali berbunyi, personil band Tiga Dusun sudah menaiki panggung untuk bersiap menghibur penonton, salah satu dari mereka juga nelayan yang sering babom. Belum sempat saya makan, saya dikejutkan oleh suara ‘pengacara’ memanggil nama saya untuk menyumbangkan sebuah lagu di atas panggung. Saya berfikir, mungkin Rais atau Puah Karim yang menyuruhnya.

### **3.2.5. Puah Sofyan: Rumput laut bagi ‘jenderal’ pensiun**

Seorang informan dengan berseloroh mengatakan: “Di Kabalutan so banyak ‘jenderal’ pensiun”. Istilah ‘jenderal’ yang digunakannya mengacu pada konsep ‘pelaku pemboman’ yang dalam masyarakat Kabalutan dianggap cukup banyak pengalaman, memiliki beberapa anak buah, punya cukup modal serta mampu mempertahankan jaringan yang kuat dengan beberapa oknum polisi. Seorang

'jenderal' dalam pikiran beberapa informan juga sangat ditentukan seberapa besar keberhasilannya bernegosiasi dengan aparat keamanan dan melepaskan diri dan anak buahnya dari proses hukum saat tertangkap. Secara umum, orang Kabalutan tidak menjuluki mereka sebagai 'jenderal' melainkan mengatakan dengan istilah 'bos'.

Di tengah masyarakat Kabalutan, sebagian 'jenderal-jenderal' ini bisa memainkan peran politik mereka karena secara ekonomi memiliki kemampuan finansial cukup besar yang diperoleh dari babom atau babius. Puah Sofyan adalah salah satu dari 'jendral' yang dimaksudnya. Kisah Sofyan yang 'pensiun' dari babom sempat dipublikasikan *Tropika*, majalah yang diterbitkan CI Indonesia. Artikel dalam majalah tersebut bahkan ikut menjuluki Sofyan sebagai 'jenderal pensiun', sebuah istilah yang juga kadang digunakan sendiri oleh Sofyan ketika bercerita tentang 'keberhasilannya' berhenti dari kegiatan babom dan babius. Ia kini ikut bersama yang lain melakukan budidaya rumput laut.

Ketika berbincang di rumahnya, saya merasa Puah Sofyan terlalu bersemangat menjelaskan tentang bagaimana ia melakukan perawatan rumput laut miliknya yang berlokasi hanya beberapa ratus meter di belakang rumahnya. Dari pelataran belakang rumahnya, yang lantainya terbuat dari susunan batang-batang mangrove ukuran kecil tersebut, saya melihat deretan botol-botol plastik bekas minuman mineral yang muncul di permukaan air laut. Di situlah lokasi rumput laut milik Sofyan berada, pada tempat yang sangat dangkal (*topor*) dan berpasir di Toroh Sidarawi. Sore itu kami duduk-duduk dan berbincang tentang kejadian gagal panen rumput laut yang dialami hampir seluruh pemilik rumput laut di Kabalutan. Setelah berjalan menyusuri desa menemui beberapa orang yang memiliki rumput laut. Beberapa orang yang saya temui mengatakan bahwa Sofyan adalah salah satu dari segelintir orang yang rumput lautnya selamat dari serangan penyakit. Oleh karenanya, saya sengaja menemuinya di rumahnya untuk mengetahui mengapa rumput laut milik Sofyan tetap dapat dipanen, sementara mayoritas pemilik rumput laut di Kabalutan harus merelakan rumput lautnya rusak dan merugi hingga jutaan rupiah.

Sofyan mengaku senang dengan pekerjaan budidaya rumput laut yang baru ia mulai sekitar satu tahun lalu ini. Menurutnya, pekerjaan tersebut hanya membutuhkan

ketekunan untuk membersihkan rumput laut setiap pagi hingga menjelang siang hari. Hal yang paling memberatkan hanyalah ketika harus berendam di laut sebatas dadanya ketika ia menggoyangkan tali-tali tempat menggantungkan rumput laut. Tujuannya adalah agar rumput laut tetap bersih karena dengan digoyangkan maka berbagai jenis lumut dan hewan kecil yang menempel pada rumput laut akan berjatuhan. Jika tidak, maka jamur dan hewan-hewan kecil tersebut akan memakan rumput laut hingga akhirnya rusak dan tak bisa dipanen. “Kebanyakan orang di sini malas lihat-lihat dorang pe rumput laut. Makanya begitu kena penyakit, dorang rata kena semua. Kalau saya tidak. Pergi cek setiap hari. Makanya, punya saya tak kena penyakit macam dorang”, kata Sofyan.

Budidaya rumput laut memang baru marak sekitar tahun 2006 di Kabalutan. Asrun adalah orang Kabalutan yang saat itu mulai mencoba budidaya rumput laut. Ia membeli bibit rumput laut pertama kali pada seorang penampung ikan yang ada di Pulau Salaka, di sebelah utara pula Batudaka. Dengan modal sendiri ia melakukan uji coba budidaya rumput laut tersebut. Ketika uji coba berhasil dan hasil panennya dijual pada penampung di Salaka, beberapa tetangganya pun tertarik untuk melakukan budidaya rumput laut. Asrun pun menjadi ‘mentor’ bagi yang lain, termasuk menghubungkan para ‘pemula’ ini dengan penampungnya di Salaka. Hasil panen perdana rumput laut yang dirasakan oleh Asrun dan beberapa tetangganya ini seperti membangkitkan minat orang Kabalutan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hanya beberapa bulan kemudian, menurut Asrun, laut di sekitar Kabalutan semakin ramai dengan botol-botol plastik bekas minuman mineral milik para pembudidaya rumput laut.

Saat mendekati desa Kabalutan di tahun 2007 lalu, dari atas perahu saya sudah melihat pemandangan yang berbeda dibanding terakhir kali saya mengunjungi Kabalutan di pada awal tahun 2006. Titik-titik kecil warna putih dan biru tampak berbaris di atas air laut di sekitar desa. Mansyur, pengemudi perahu yang saya tumpangi mengatakan bahwa orang Kabalutan sedang gemar ‘tanam’ rumput laut. Istilah ‘tanam’, atau *batanam* dalam logat setempat, mereka gunakan untuk menyebut aktifitas budidaya rumput laut ini. Semakin mendekati desa, ketika berada di atas

hampanan terumbu karang di Sappa Matilla, perahu berputar lebih jauh karena harus menghindari tali-tali plastik tempat rumput laut bergantung dengan posisi tenggelam antara 1 hingga 1,5 meter di bawah permukaan laut. Tali-tali tersebut menjulur ke berbagai arah, menghubungkan tiap-tiap botol plastik yang berfungsi sebagai pelampung. Orang Kabalutan menyebut barisan botol-botol yang terhubung dengan tali-tali plastik ini dengan istilah *longlen*, yang berasal dari bahasa Inggris *long line*. Mansyur pun harus mengurangi kecepatan mesin perahu (katinting), matanya terus tertuju pada *longlen*, terutama pada tali-tali yang terbenam di bawah. Air laut yang jernih dan hampanan pasir putih di bawah perahu memudahkan kami melihat tali-tali tersebut. Beberapa kali saya melihat Mansyur mengangkat batang besi poros baling-baling perahunya agak tinggi. Terkadang ia mengangkatnya hingga di atas air jika merasa posisi tali-tali tersebut lebih tinggi dari baling-baling perahu. Ia tak mau menghadapi persoalan dengan pemilik rumput laut apabila baling-balingnya terjatuh pada *longline* dan merusak rumput laut. Jika hal itu terjadi, konflik atau perkelahian fisik bisa muncul, setidaknya Mansyur harus membayar ganti rugi yang baginya tak ringan. Menurutnya, beberapa pemilik rumput laut sering menemui *longline* milik mereka putus, entah terkena baling-baling atau dicuri. Sebagian tali, dan rumput laut yang masih terikat, hanyut terbawa arus. Sebagian lagi ada yang berhasil ditemukan kembali karena tersangkut di sela-sela karang yang cukup luas tersebar di sekitar desa dan lokasi budidaya. Baik terkena baling-baling ataupun dicuri, sebenarnya tak akan menimbulkan persoalan sejauh tak diketahui pelakunya. Tapi, saat itu Mansyur sangat berhati-hati karena beberapa orang tampak tak jauh dari perahu kami. Tubuh mereka terendam di laut hingga setinggi dada. Orang-orang ini adalah orang-orang Kabalutan yang memiliki rumput laut, atau mungkin anggota keluarga mereka, yang sedang merawat dan membersihkan rumput laut.

Budidaya rumput laut juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan praktek pemanfaatan sumberdaya laut oleh orang Bajo di Kabalutan. Pemerintah Touna, LSM lingkungan, bahkan beberapa orang Bajo Kabalutan menganggap maraknya budidaya rumput laut di Kabalutan telah mengurangi aktivitas babom dan babius oleh orang-orang Kabalutan. Mereka menganggap bahwa orang

Kabalutan menjadi lebih sibuk mengurus rumput laut sehingga tak lagi sempat babom maupun babius. Saya melihat ini sebagai sebuah pembenaran yang menguatkan identitas Bajo sebagai pelaku babom dan babius. Analisis Lowe pun, bahwa babom dan babius oleh orang Sama di Susunang merupakan implikasi masuknya jaringan pasar internasional untuk ikan-ikan karang hidup (*live-reef fish*), mendapatkan relevansinya apabila dikaitkan dengan budidaya rumput laut ini. Ketika nelayan Kabalutan berpindah, meski tidak sepenuhnya pindah, dari jaringan pasar ikan karang ke dalam jaringan pasar rumput laut yang juga berorientasi ekspor, mereka pun cenderung menjauh dari kegiatan babom dan babius karena pekerjaan ini lebih kecil resikonya bagi keselamatan diri serta dapat dilakukan dekat desa sehingga bisa melibatkan anggota keluarga mereka sebagaimana kini dilakukan Puah Sofyan ini.

### 3.3. Mengendalikan Akses Orang Bajo di Laut

Praktek babom dan babius di kepulauan Togeian tak hanya dilekatkan pada orang Bajo, namun telah ikut mempengaruhi kontrol orang lain terhadap akses orang Bajo atas sumberdaya alam di laut. Pengendalian terhadap orang Bajo tak hanya dilakukan oleh desa lain, melainkan juga oleh sesama orang Bajo di Kabalutan. Kasus-kasus di bawah ini menggambarkan bagaimana pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang praktek babom dan babius yang terkait dengan keberadaan nelayan Bajo dari Kabalutan telah mendorong terbentuknya tindakan-tindakan pengendalian terhadap akses orang-orang Bajo tersebut. Bentuk-bentuk kontrol yang ditampilkan meliputi penetapan aturan tertulis, pemberian surat keterangan, penentuan teritori, hingga pelibatan institusi negara dalam penegakan hukum.

#### 3.3.1. Pengendalian dari Dalam

##### **SURAT - KETERANGAN**

Nomor: 80/Kes/001/II/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Desa Kabalutan menerangkan dengan benar bahwa:

Nama	: Wandu
Umur	: 25 tahun
Pekerjaan	: Nelayan

Universitas Indonesia

Agama : Islam  
 Alamat : Desa Kabalutan  
 Tujuan : Mencari hasil laut (teripang)  
 Kendaraan : Perahu jarangka mesin katinting  
 Perlengkapan : Alat penyelam (kompresor)  
 Pengikut : 3 orang  
 Waktu : Selama 1 bulan

Benar-benar adalah warga masyarakat desa Kabalutan yang berpropesi sebagai Nelayan pencari teripang dan jenis biota laut lainnya yang dapat dikomersilkan dengan tidak menggunakan fasilitas yang merusak terumbu karang seperti 'BOM' dan 'BIUS'.

Selanjutnya setelah tiba di wilayah desa yang dituju dan sebelum melakukan aktifitas, maka harus melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa setempat dan ketika mendapat kesulitan segera melaporkan diri guna diketahui untuk mendapatkan bantuan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Kabalutan, 10 April 2008  
Kepala Desa Kabalutan

(Asri S. Saudang)

Kalimat tersebut memenuhi halaman pertama sebuah surat yang dicetak di atas kertas dengan *kop* surat bergambar logo pemerintah kabupaten Tojo Una-una. Surat tersebut baru saja ditandatangani Puah Kepala dan diberikannya pada Wandu yang sudah lebih dari satu jam menunggu sambil berbincang dengan saya di ruang tengah rumah Puah kepala. Halaman kedua atau halaman terakhir surat tersebut, memuat sebuah tabel empat kolom dengan judul 'Daftar Nama Pengikut'. Kolom pertama berisi nomor yang menjelaskan jumlah nelayan yang ikut dengan Wandu. Kolom kedua berisi nama-nama pengikut dan kolom berikutnya berisi usia mereka masing-masing. Judul kolom terakhir tertulis kata 'hubungan', yang tampaknya untuk menjelaskan hubungan sosial antara para pengikut dengan Wandu. Dalam baris-baris tabel di kolom terakhir tertulis kata 'sepupu', 'keponakan', dan 'ipar'.

Bentuk dan bunyi kata-kata dalam surat tersebut sepenuhnya dibuat oleh Puah Kepala, setelah dia berdiskusi dengan beberapa petugas pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi, ketika saya tanyakan apa gunanya mencantumkan kolom 'Hubungan' dalam surat keterangan tersebut, Puah kepala justru tertawa kecil dan tampak agak ragu waktu memberi jawaban. "Biar orang tahu saja, yang ikut itu siapa. Saya juga perlu tahu, apa itu orang Kabalutan atau orang luar. Jangan-jangan ada pengikut yang tidak saya kenal, ternyata saudaranya Wandu".

Usai membaca sekilas surat tersebut, Wandi pun pamit dan mengucapkan terima kasih.

Entah sudah berapa lembar surat serupa yang telah ditandatangani Puh Kepala (desa Kabalutan). Juga, sudah berapa banyak nelayan di Kabalutan yang harus membekali diri mereka dengan surat seperti ini saat pergi mencari hasil laut. Bagi nelayan seperti Wandi, ini adalah tindakan ‘penyelamatan diri’, sebuah langkah ‘menghindar’ dari sebuah praktek pengawasan yang makin sering dilakukan oleh penduduk di desa lain di kepulauan Togean. Wandi memiliki pengalaman diusir penduduk desa Dolong dan petugas patroli kantor perikanan kecamatan Walea Kepulauan, ketika bersama kerabatnya sedang *balobe* teripang malam hari di perairan sekitar desa Dolong. Saat itu, ia diinterogasi dan perahu mereka digeledah petugas karena dicurigai menyimpan bom ikan atau cairan potassium sianida. Sebelum diusir, petugas meminta mereka lain kali membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa. Sebelum mencari hasil laut di Dolong, mereka juga harus melapor terlebih dahulu dan menunjukkan surat keterangan tersebut pada kepala desa Dolong. Oleh karenanya, pada halaman kedua surat tersebut, di bawah tabel Daftar Nama Pengikut, dituliskan: ‘Telah diperiksa di:’, yang disusul kemudian dengan beberapa baris kalimat bertuliskan seperti berikut:

1. Desa (sekitar lokasi mencari hasil laut)..... Kecamatan.....
- Oleh Petugas berwenang di desa tanggal.....
- Tanda tangan dan nama jelas (petugas desa yang dituju).....
- Cap desa.....

Wandi membenarkan efektifitas surat keterangan tersebut. Setidaknya, sejak ia *balobe* membawa surat keterangan, ia tak pernah lagi diusir saat mencari hasil laut di sekitar Dolong atau di desa lain. Surat yang ia terima kali ini akan ia gunakan untuk bapongka ke wilayah yang lebih jauh, yaitu sekitar Pagimana dan Bunta, di pesisir pulau Sulawesi sebelah selatan kepulauan Togean. “Tapi, saya tak pernah babom, apalagi babius. Kalau babom babius, tetap saja diusir, malah bisa-bisa dorang [petugas atau masyarakat desa lain] tangkap”, kata Wandi.

Mansyur, nelayan lain di Kabalutan memiliki pengalaman yang tak jauh berbeda. Ia dan beberapa rekannya satu kelompok *balobe* bahkan sempat dikejar oleh

penduduk desa Bangkagi ketika sedang mencari teripang di sekitar desa tersebut. Tiga perahu yang mereka gunakan ketika itu harus dipacu secepat mungkin untuk menghindari kejaran orang-orang Bangkagi. Pasalnya, rombongan Mansyur dianggap telah mengambil teripang di perairan sekitar Tanjung Talawanga. Saat mereka singgah di pulau Buluh yang berada dimuka desa Bangkagi untuk beristirahat sambil merebus teripang, datanglah sebuah perahu berisi kepala desa Bangkagi dan beberapa orang lainnya. Mereka menanyakan lokasi penangkapan teripang yang dilakukan Mansyur serta alat tangkap yang mereka gunakan. Mansyur dan kawan-kawan dicurigai melakukan pembiusan ikan. Manakala kepala desa Bangkagi mengetahui bahwa Mansyur telah mengambil teripang dari Talawanga, kepala desa Bangkagi memerintahkan Mansyur dan teman-temannya untuk ikut ke balai desa Bangkagi.

Di balai desa mereka diberitahu bahwa Talawanga termasuk wilayah Bangkagi, dan Mansyur harus mendapat ijin tertulis dari kepala desa. Setelah surat ijin dibuat, rombongan Mansyur diminta membayar biaya pembuatan surat ijin. Tidak hanya itu, kepala desa Bangkagi juga memerintahkan Mansyur dan teman-temannya untuk menjual seluruh teripang yang ditangkap kepada kepala desa. Mansyur menyatakan setuju, meskipun ini hanya tipu muslihatnya agar dapat segera pergi dari Bangkagi. Terbukti, ketika Mansyur dan rombongannya telah berada di perahu kembali, mereka langsung memacu secepat mungkin perahu mereka. Mengetahui telah tertipu, kepala desa Bangkagi mencoba mengejarnya meski tak berhasil. Mansyur dan teman-temannya terus melaju menuju arah pulau Malenge dan singgah di pulau Papan, salah satu pulau yang didominasi oleh orang-orang Bajo, untuk bersembunyi.

“Saya tak tahu depe batas, apakah Talawanga masuk wilayah Bangkagi? Kalau di darat mungkin ada, tapi di laut saya tak tahu batasnya”, kata Mansyur ketika saya menanyakan pengetahuannya tentang batas-batas wilayah Bangkagi di laut. Sejak kejadian tersebut, Mansyur semakin hati-hati, meski tetap merasa bingung, ketika menentukan lokasi tempat mencari teripang. Bagi Mansyur, laut kini tak lagi sebagai ruang tanpa batas. Laut adalah wilayah yang memiliki sekat-sekat imajiner, yang kadang ia sendiri harus menentukan milik siapa wilayah-wilayah yang tersekat

tersebut. Ia juga harus memutuskan pada siapa ia melapor dan meminta ijin untuk mencari hasil laut di suatu lokasi. Ia menyadari bahwa pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh desa lain terhadap nelayan Bajo disebabkan anggapan orang lain bahwa suku Bajo adalah perusak terumbu karang.

Bagi Puah Kepala, penerbitan surat keterangan tersebut adalah jalan keluar yang terpaksa harus dilakukan untuk melindungi nelayan-nelayan di Kabalutan. “ini cuma buat nelayan yang *balobe* dengan kompresor. Mereka biasanya *bapongka* jauh sampai ke desa-desa lain, bisa sampai 1 bulan. Kalau nelayan-nelayan kecil yang cuma mengail, apalagi mendayung sampan, tidak jauh. Mereka *pulang hari* [berangkat pagi, pulang sore], hanya di sekitar Kabalutan saja”, kata Puah kepala menjelaskan alasan pembuatan surat tersebut. “Dorang ini [nelayan pengguna bom dan bius ikan] memang nakal. Bikin repot saja. Saya ini sudah berapa kali urus mereka yang tertangkap. Apalagi kalau sudah ada yang meninggal kena bom. Kasihan keluarga mereka, isterinya, anaknya. Siapa yang mau cari makan?”. Kata Puah kepala.

Puah kepala bukan satu-satunya yang menggunakan alasan ‘kemanusiaan’. Orang lain pun ada yang berkomentar seperti itu namun memiliki konteks yang berbeda. Dalam sebuah seminar tentang revisi tata ruang di kepulauan Togean yang dihadiri oleh perwakilan beberapa desa, seorang peserta dari desa Malenge mempertanyakan perilaku polisi yang dianggapnya tidak tegas terhadap nelayan yang tertangkap karena menggunakan bom atau bius. “Mereka hanya ditangkap, ditahan di kantor polsek, dua tiga hari keluar lagi. Bagaimana ini?”. Kepala Polsek saat itu beralasan bahwa institusinya serba salah menindak pelaku pemboman dan pembiusan yang tertangkap. “Ini soal kemanusiaan saja. Kalau mereka ditangkap, diproses pengadilan jalan, sementara mereka ditahanan, siapa yang kasih makan anak isteri mereka di rumah?”. Peserta lain dari desa Tumotok memprotes pendapat Kapolsek tersebut dengan mengatakan: “kalau mereka mati kena bom, lebih parah lagi. Siapa yang mau kasih makan anak isterinya? Polisi mau tanggungjawab?”. Saya mengenal dua peserta yang berbicara ini. Seperti kebanyakan orang-orang di kepulauan Togean, mereka tahu bahwa proses pelepasan nelayan yang tertangkap tersebut penuh dengan

‘suap’ atau ‘uang tebusan’. Di sini ada perbedaan antara Puh Kepala, polisi dan orang Tumotok tadi ketika menggunakan alasan ‘kemanusiaan’.

Bagi saya, surat keterangan yang diterima Wandu dari Puh Kepala adalah tekstualisasi dari sebuah relasi sosial, atau wujud dari makna-makna di dalam hubungan sosial yang dituangkan dalam sebuah teks. Itu adalah sebuah bentuk wacana yang dibakukan (*fixed*) yang mengandung hubungan antara identitas sosial seorang nelayan yang dibangun berdasarkan praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya alam dengan proses teritorialisasi di wilayah laut yang lahir akibat konstruksi identitas tersebut (Ricoeur, 1976). Kalimat dalam surat tersebut sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari wacana pemboman dan pembiusan, lebih dari sekedar menerangkan identitas seseorang dan apa yang akan ia lakukan. Seseorang tentunya akan sulit menangkap relasi-relasi seperti itu dalam ‘teks surat keterangan’ tersebut tanpa mengetahui konteks sosial di dalamnya. Wacana dalam hal ini merupakan teknologi kekuasaan (*technology of power*) yang diproduksi ketika kekuasaan dipraktikkan (Foucault, 1980).

Dengan berpendapat seperti itu saya sedang mencoba menunjukkan bahwa Wandu, Puh Kepala, nelayan lain di Kabalutan yang juga menjadikan surat ini sebagai ‘langkah penyelamatan’, petugas perikanan kecamatan, serta warga desa lain yang melakukan kontrol terhadap nelayan Kabalutan sesungguhnya tengah berada dalam sebuah jaringan di mana kekuasaan diproduksi dan digunakan dalam relasi sosial mereka, atau meminjam istilah Foucault mereka merupakan sebuah *net-like organisation* (1980:98). Saya ingin berargumen bahwa masing-masing dari mereka secara simultan menjadi target sekaligus elemen di mana kekuasaan diartikulasikan atau ditunjukkan. Tiap aktor memiliki intensi atau maksud yang berbeda, yang memiliki makna dan diharapkan dapat dipahami pula oleh orang lain sehingga mendapat reaksi yang dibayangkan.

Petugas perikanan atau warga desa lain yang melakukan patroli terhadap nelayan Kabalutan telah memberi efek terhadap perilaku seperti apa yang sebaiknya dilakukan nelayan Kabalutan kalau mereka ingin *balobe* di wilayah di luar Kabalutan.

Dengan menerbitkan surat keterangan, Puah kepala berharap dapat sekaligus memantau dengan lebih mudah setiap nelayan Kabalutan yang akan *balobe*. Ia dapat mengawasi nelayan Kabalutan yang akan *babom* atau *babius*. Tapu, bagaiman jika ada nelayan yang membuat surat tersebut tapi kenyataannya mereka *babom* atau *babius*? Suatu sore di belakang rumahnya, ia berkata: “Saya sudah kasih tahu semua nelayan lewat kepala-kepala dusun. Kalau mau mencari [hasil laut], lebih baik bawa surat keterangan. Saya tidak akan ikut bertanggungjawab, urus sendiri saja kalau tiba-tiba ada yang tertangkap karena *babom* atau *babius*”.

Pandangan sebagian penduduk kepulauan Togeian bahwa orang Bajo di Kabalutan atau yang menetap di desa-desa lain sebagai pelaku pemboman dan pembiusan telah ikut mempengaruhi bentuk-bentuk relasi sosial mereka dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Beberapa desa di kepulauan Togeian telah mengembangkan mekanisme kontrol terhadap nelayan-nelayan Bajo yang mencari hasil laut di sekitar mereka. Bentuk-bentuk kontrol terhadap orang Bajo ini dilakukan mulai dari teguran, pengusiran, hingga penerapan hukuman bagi nelayan Bajo yang dicurigai atau terbukti menggunakan bahan peledak atau potasium sianida.

Tekanan penduduk desa lain terhadap nelayan-nelayan asal Kabalutan ternyata juga berpengaruh pada bagaimana orang-orang Kabalutan dalam melakukan kontrol di antara mereka. Kesepakatan kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabalutan untuk memberi surat keterangan bagi penduduk Kabalutan yang akan melakukan *bapongka* merupakan bentuk pengawasan yang baru muncul dalam dua tahun terakhir ini.

### 3.3.2. ‘Acting (not) like a state’

Lembanato, Maret 2005, pukul 20.00. Malam itu, selesai makan malam di rumah Talib dan bersantai sejenak, saya dan Talib langsung menuju ke rumah Arifin, kepala desa Lemabanto. Ada keperluan untuk membahas tentang utusan dari Lembanato yang akan dikirim untuk pelatihan monitoring terumbu karang. Jalan desa gelap, pada sisi kiri kanan jalan berdiri rumah-rumah orang Bobongko. Banyak rumah yang masih menggunakan lampu minyak tanah. Beberapa rumah hanya

diterangi lampu listrik ukuran kecil, mungkin sekitar 10 watt, jadi sangat remang dan tak sanggup menerangi jalan berbatu yang kami lalui. Langit memang gelap saat itu. Dari jalan desa saya melihat pemandangan teluk kilat yang gelap. Beberapa titik terang terlihat agak jauh. Beberapa bagang sepertinya sedang beroperasi. Hari ini memang masih *turoh*, istilah orang Bobongko untuk masa bulan gelap dalam setiap bulan, di mana ikan-ikan teri (*ligo*) dan ikan-ikan kecil lainnya mulai memasuki teluk Kilat.

Begitu mencapai puncak jalan yang menanjak, tepat di muka bangunan kayu bekas Polindes yang telah dikelilngi alang-alang, saya sudah melihat bagian muka rumah Pak Kepala yang terang oleh lampu neon. Suara genset terdengar sayup dari sebelah rumahnya. Tapi, tampak banyak sekali orang berkerumun di depan rumah, sebagian saya lihat duduk-duduk bergerombol di pinggir lapangan sepak bola di depan rumah Pak Kepala. Saya tanyakan Talib, mengapa banyak orang di muka rumah Pak Kepala. Talib ternyata juga tak tahu. Ketika mendekati orang-orang yang duduk di sisi lapangan sepak bola, Talib bertanya apa yang terjadi saya mendengar Talib bertanya pada salah seorang anak muda dengan bahasa Bobongko “Olo taiyo [ada apa]?”. Dari jawaban anak muda tadi saya langsung menangkap artinya: “orang Kabalutan, *balobe* masuk Kilat”. Rasa penasaran pun terus mengikuti saya hingga persis di muka pagar rumah Pak Kepala. Kami mencoba menerobos kerumunan penduduk yang berjejal di muka pintu rumah. Tampak terang di dalam rumah Pak Kepala. Dari luar, lewat jendela yang terbuka lebar, saya melihat beberapa orang sedang duduk berjajar dalam ruangan membelakangi saya. Salah seorang penduduk yang ada di depan pagar langsung bertanya ketika melihat saya datang. Saya tak tahu namanya, tapi saya tahu persis ia adalah warga Lembanato: “Gimana mas Jaya? Pak kades mau kasih ijin itu orang Kabalutan” katanya. Saya berhenti sejenak, ”Memangnya ada apa?” tanya saya karena tak tahu persis persoalannya. “Dorang mau *balobe* di Kilat. Torang takut dorang mau *babius*”, katanya lagi. Saya cuma senyum dan langsung mendekat ke pintu rumah.

Belum mencapai pintu, saya kaget ketika ada seorang lelaki memanggil saya: “Pak Jaya!” katanya sambil menghampiri dan langsung menggenggam erat

pergelangan tangan saya. Setengah terkejut, saya hanya menjawab:”Eee....sedang apa di sini?” tanya saya terkejut. Saya juga tak tahu (lupa) nama orang ini, tapi saya tahu ia warga warga Kabalutan. “Ini, *baurus* ijin kepala desa. Mo *balobe* di Kilat torang. Yusril di dalam” katanya. Yusril adalah salah seorang warga Dusun Satu, desa Kabalutan. Di dekatnya tampak 3 anak muda yang saya tahu juga mereka adalah warga Kabalutan. Saya masuk sambil mengucapkan salam. Talib ternyata sudah di dalam. Ketika saya terhenti oleh beberapa orang tadi, ia memang terus saja masuk sendiri.

Pak Kepala, dengan mimik muka ‘diseriuskan’ tapi sesungguhnya bergurau menjawab lantang salam saya. Begitu saya masuk, ia memang terlihat serius sekali mengetik sesuatu dengan mesin ketik pemberian CII dalam program RARE Pride Campaigne tahun 2003 lalu. Tampak, seperti biasa saya lihat, mulutnya komat-kamit membaca apa yang ditulis. Di sebelah mesin ketik terlihat sebatang rokok *Gudang Garam Internasional* di atas asbak kaleng berwarna merah. Saya selalu melihat Pak Kepala merokok saat mengetik. “Silakan duduk, mas Jaya” katanya. Saya selalu menunggu kelakar-kelakar Pak Kepala, meskipun dalam keadaan serius. Tapi tampaknya kali ini tidak demikian. Talib langsung menyodorkan kursi plastik pada saya. Sebelum duduk saya bersalaman dengan beberapa lelaki yang duduk melingkari ruang tamu. Saya melihat ada 2 orang ditambah Talib, salah satunya adalah Yusril. “Gimana kabar, pak Jaya” tanya Yusril begitu saya bersalaman dengannya. “Baik, gimana kabar Yusril?” saya balik bertanya. “Biasa” katanya. Jawaban ‘biasa’ umum dipakai oleh orang di kepulauan Togeana ini ketika ditanya kabarnya. Jawaban seperti ini saya tangkap sebagai kata lain untuk ‘biasa saja’, ‘tidak buruk, tidak juga terlalu baik’. “Kapan ke Kabalutan” tanya Yusril begitu kami telah duduk. “Setelah dari Lembanato ini, tapi belum tahu tanggal berapa” kata saya. Di sebelah Yusril duduk seorang laki-laki yang juga warga Kabalutan dari Dusun Satu. Ia masih kerabat dekat Yusril. Saya memang berencana ke Kabalutan setelah segala pekerjaan untuk CII telah selesai saya lakukan, antara lain melihat beberapa teman yang mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Teluk Kilat, sebuah program kerjasama antara CII

bersama warga Lembanato dan Matobiai. Dua desa ini berada di dalam kawasan Teluk Kilat, yang hampir seluruh penduduknya adalah suku Bobongko.

Saat berbincang-bincang sambil menikmati kopi susu yang disajikan, perhatian kami langsung tertuju pada Pak Kepala yang tiba-tiba berbicara lantang sebagaimana biasanya: “Jadi begini, bapak-bapak”, ucapannya jelas ditujukan pada Yusril dan teman-temannya dari Kabalutan. “Ini surat ijin memang sesuai dengan kesepakatan warga desa Lembanato, semua orang luar yang mencari hasil laut di Teluk Kilat mesti dapat ijin dari kepala desa Lembanato. Ini teluk kilat sudah dilindungi orang Bobongko. Maksudnya, supaya tidak ada lagi yang melakukan pemboman dan pembiusan. Kalau kedatangan babom atau babius, perahu disita dan pelaku kami serahkan ke polisi”, kata Pak Kepala. Setelah membacakan dalam hati surat yang baru ia ketik, mungkin memeriksa kembali apakah masih ada yang kurang sesuai atau salah ketik, Pak Kepala langsung menandatangani, memberi stempel dan menyerahkannya pada Yusril. “Sekarang silakan bapak-bapak *balobe*. Jadi, ingat. Ini Teluk Kilat sudah jadi daerah perlindungan masyarakat. Jangan babom, babius”, kata Pak Kepala mengingatkan. Yusril dan teman-temannya pun bergegas berdiri dan meminta ijin pergi. Saya juga berdiri untuk bersalaman dengan mereka. Sementara yang lain masih tetap dalam ruangan bersama Pak Kepala, saya mengikuti Yusril dan teman-temannya hingga keluar pagar rumah. Di luar teman-teman Yusril lainnya sudah menunggu dan siap untuk pergi. Kerumunan warga Lembanato masih terlihat di muka rumah. Yusril dan saya berbincang sejenak. “Jadi, berapa orang semuanya?,” tanya saya. “Berlima ini” kata Yusril. “Satu perahu?,” tanya saya lagi. “Iya, itu [perahu] sandar di dermaga” katanya sambil menunjuk ke arah dermaga kecil sekitar 100 meter arah selatan dari rumah Pak Kepala. “Betul te babius ini?” tanya saya pada Yusril. “Betul, pak Jaya. Kami ini cuma mau *balobe* taripang. Tadi perahu sudah diperiksa pak kepala” kata Yusril. Sebetulnya apakah mereka akan babius atau babom tak terlalu saya pikirkan. Saya mengkhawatirkan implikasinya bagi mereka jika sampai orang Lembanato mendapati mereka melakukan dua kegiatan tersebut. “Betul pak kepala bilang, ini Teluk Kilat memang sudah dijaga betul sama orang Lembanato dan Matobiai. Sama seperti di Sidarawi, Yusril tahu itu kan?,” tanya saya.

Yusril mengaku tahu bahwa di Kabalutan juga telah ada kesepakatan untuk menjaga 11 titik terumbu karang yang dijaga dan dilindungi dari kegiatan pemboman dan pembiusan, sebuah daerah perlindungan seperti yang dilakukan di teluk Kilat ini. Toro Sidarawi adalah salah satu lokasi terumbu karang yang dijadikan zona inti, bebas dari pemanfaatan. “Ya sudah, salam buat pak Kepala (kabalutan), bilang saya mau ke sana, mungkin minggu depan,” kata saya sambil bersalaman lagi dengan Yusril dan teman-temannya.

Begitu mereka pergi, sebelum saya masuk kembali ke dalam rumah Pak Kepala, Azis, salah seorang petugas desa, sudah menghampiri saya. Rupanya ia baru datang. Sambil berjalan bersama menuju pintu rumah Pak Kepala, Azis berkomentar: “Behh!, saya tak setuju dengan pak Kepala. Masa dorang dikasih ijin *balobe*. Dorang itu mau babius. Banyak sekali akalunya itu. Mau saya tak usahlah pak kepala kasih ijin. Suruh pergi saja mereka itu” kata Azis setengah berbisik. Kerumunan di muka rumah Pak Kepala sedikit berkurang. Tapi ada beberapa lelaki yang juga mendekati saya dan Azis. “Iya, pak Jaya. Sebetulnya tak usah mereka dikasih ijin. Daripada mau habis teripang kita [di teluk Kilat]”, kata salah seorang dari mereka berkomentar seakan menyetujui ucapan Azis. Saya tak berani menjawab, pikiran saya seperti bola dalam permainan ‘dingdong’ atau *pinball*, terpental ke sana kemari. Banyak hal yang saya bayangkan bakal terjadi, dan banyak pula hal yang saya pikir harus dilakukan untuk mengatasi masalah di desa ini. Sebagai salah satu pelaku dari proses pengembangan daerah perlindungan laut ini, saya sudah mengkhawatirkan soal ini sejak awal program dijalankan.

Azis terus mengikuti saya masuk ke dalam rumah Pak Kepala. Terlihat Talib dan Pak Kepala sedang berbincang serius. Saya mendengar pembicaraan mereka soal pembagian Raskin (beras untuk orang miskin). Saya sudah menduga, Pak Kepala pasti langsung berkomentar pada Azis soal kedatangannya yang terlambat. “Susah kalo begini, punya anak buah selalu lambat” kata Pak Kepala. Saya tahu ia serius, tapi juga bercanda. “Tadi makan dulu pak Kepala” kata Azis sambil tersenyum seakan mengejek Pak Kepala. Tapi, Azis langsung menyampaikan protes pada Pak Kepala soal ijin *balobe* yang diberikan pada Yusril. “Saya tak setuju dengan pak

Kepala. Harusnya tak usah dikasih ijin”, kata Azis. “Sudah...itu perahu sudah saya geledah tadi. Memang cuma mau *balobe* dorang itu. Cuma ada panah dengan alat pacing saja. Memang ada kompresor. Tapi tidak ada bius atau bom”, kata Pak Kepala. “Tapi, kalo mereka bawa kompresor, itu biasanya babius, pasti babius mereka itu,” kata Azis bersikukuh. “Belum tentu, kita tidak bisa langsung tuduh begitu. Lagi pula, kesepakatan kita kan semua orang boleh mencari di teluk Kilat, asal tidak babom babius” kata Pak Kepala. “Pokoknya saya tetap tak setuju” kata Azis. Pak Kepala cuma diam, tampaknya ia tak mau memperpanjang soal ini. Demikian juga Azis. Ia juga hanya diam saja. Saya dan Talib sejak tadi hanya tersenyum mendengar mereka berdebat. Kami seperti sudah terbiasa melihat mereka dalam suasana seperti itu, untuk beragam persoalan.

Obrolan Pak Kepala dan Azis kemudian berpindah ke soal pembangunan bagian belakang rumah Pak Kepala. Azis memang *bas* (tukang bangunan) yang membangun bagian belakang rumah Pak Kepala. Menarik hubungan mereka berdua ini. Bagi saya yang sudah mengenal keduanya selama empat tahun ini, mereka seperti ‘benci tapi rindu’. Pada saat tertentu mereka tampak seperti atasan dan bawahan. Saat lain mereka seperti musuh bebuyutan yang selalu berdebat dan saling berkomentar negatif satu sama lain seperti baru saja terjadi. Saat lainnya mereka selalu berjalan beriringan, bekerja sama untuk banyak urusan di luar tugas pemerintahan desa. Pak Kepala sering cerita pada saya soal perilaku Azis yang dianggapnya tidak sesuai, demikian pula Azis tentang Pak Kepala. Mengingat bentuk interaksi mereka seperti itu, saya dan Thalib, juga beberapa orang di Lembanato biasanya tak terlalu khawatir jika Azis dan Pak Kepala sudah berdebat, sesengit apapun. Kadang saya atau Thalib malah tertawa atau senyum-senyum, atau menggoda mereka berdua, seperti perdebatan soal surat ijin tadi.

Obrolan kami kemudian beralih ke soal rencana-rencana kegiatan yang sudah dikerjakan kelompok DPL teluk kilat. Dari cerita Thalib, Pak Kepala dan Azis, saya mendapat kesan bahwa kelompok sudah bertemu beberapa kali dan mulai membagi tugas untuk membuat papan pengumuman di Urung Dolom. “Terus terang ini pak, Jaya. Kita cuma butuh cat saja buat tulisan di nambor. Dua warna saja, putih sama

hijau. Nanti kayu-kayu torang cari saja. Kecuali papan buat bikin sabua, kita butuh bantuan CI” kata Azis. “Saya coba nanti bicara sama teman di CII soal papan sama cat ini. Mungkin dia yang akan atur itu” jawab saya.

“Jadi, begini mas Jaya” Pak Kepala angkat bicara. “Soal ijin tadi itu, memang banyak warga Lembanato yang kurang setuju kalo orang dikasih ijin *balobe* di Teluk Kilat. Alasannya, itu cuma alasan dorang mau *babius*. Apalagi pemilik bagang ini. Dorang mau te usah dikase ijin. Tapi kan kesepakatan desa waktu bahas Perdes, Teluk Kilat ini cuma dilindungi oleh orang Lembanato dan Matobiai dari bom dan *buis*. Semua boleh mencari asal tidak merusak” kata Pak Kepala. “Saya juga setuju. Yang paling penting menurut saya, orang Lembanato dan Matobiai hati-hati, kalau terlalu keras pada orang luar yang mau *balobe* atau mengail di sini, mereka bisa balas dendam. Jangan-jangan orang Lembanato tak bisa lagi mencari ke luar Teluk Kilat. Baku atur saja. Saya cuma kuatir ini bisa ribut orang Lembanato dengan desa lain. Bukan dilarang masuk, tapi dilarang *babom babius*, seperti kemauan orang Lembanato dan Matobiyai. Kalau itu kan tak usah di Teluk Kilat, di mana-mana *babom babius* memang dilarang polisi *toh*” kata saya. “Te usah takut, mas Jaya. Orang di sini so sepatok pokoknya kalo so bawa-bawa kompresor lebe bae diusir saja. So banyak bukti dorang cuma ba akal, padahal *babius*. Apalagi orang Kabalutan” kata Azis penuh emosi. Seperti biasa, ia memang selalu ingin bersikap tegas pada orang-orang yang *babom* dan *babius* di teluk kilat.

Saya kembali gelisah mendengar komentar Azis. Pengalaman saya hidup dengan mereka, orang Bobongko ini, sering menemui kasus di mana mereka terlihat apatis begitu menghadapi orang luar. Kecurigaan, terutama terhadap pemerintah, seringkali dikaitkan dengan eksistensi mereka sebagai orang Bobongko. Mereka merasa orang luar sengaja menganggap rendah derajat orang Bobongko di kepulauan Togean. Latar belakang sejarah mereka yang yang dikonstruksi orang luar Bobongko memang mengandung stereotipe tentang kehidupan mereka sebagai ‘orang primitif’. Orang-orang kecamatan, beberapa aktivis NGO yang berasal dari penduduk setempat, bahkan beberapa pengurus Aliansi Masyarakat Adat Togean pernah bercerita pada saya bahwa orang Teluk Kilat suka menggunakan ilmu hitam (*doti*), penderita lepra,

sekaligus pula tradisi mengayau kepala yang dilakukan oleh leluhur orang Bobongko. Orang Bobongko dianggap sebagai komunitas yang ‘keras kepala’, mudah angkat parang, dan kurang berpendidikan.

Namun, dalam kasus dengan orang Kabalutan, saya lebih merasa khawatir dari persoalan identitas tersebut. Bukan soal stereotipe orang terhadap Bobongko. Masalahnya, orang Kabalutan dan Lembanato merupakan dua komunitas di mana saya dan CII mengembangkan DPL ini. Cerita-cerita orang tua di Lembanato maupun Kabalutan bertemu pada titik yang sama, yaitu konsep ‘mobela’ atau hubungan persahabatan menyerupai saudara antara orang Bobongko dan Lembanato. Dahulu, pada saat terjadi pertempuran antara orang Togeian dengan orang Tobelo, suku Sama atau Bajo yang ada di Kabalutan diceritakan bahu membahu dengan orang Bobongko yang bermukim di puncak gunung Benteng. Selain itu, di luar situasi perang, orang-orang tua di kampung juga menceritakan bagaimana persahabatan orang Bajo dengan Bobongko ketika mereka berpapasan di laut. Orang Bobongko sering melakukan barter garam dengan ikan dari orang Bajo. Terlepas dari benar tidaknya kisah-kisah tersebut, pada kenyataannya, saya memang belum pernah mendengar cerita-cerita dari Bobongko maupun Bajo tentang keburukan mereka satu sama lain. Justru yang terdengar pada saya adalah bagaimana cerita negatif dari Bobongko maupun Bajo tentang beberapa orang yang mengaku suku Togeian. Antara orang Bobongko dengan Bajo memang belum pernah terdengar terjadi masalah. Bahkan, di Matobiai ada seorang Bajo asal Kabalutan yang menikah dengan orang Bobongko yang hingga sekarang dipanggil dengan sebutan ‘bela’, bukan namanya.

Tapi, pada kasus Yusril dan surat ijin *balobe*, tampaknya ‘mobela’ perlu dilihat kembali berdasarkan konteks permasalahannya. Orang Bobongko jengkel dengan Kabalutan karena sering melakukan pemboman dan pembiusan ikan di Teluk Kilat. Sikap-sikap represif orang Bobongko terhadap orang luar, terutama asal Kabalutan, lebih disebabkan oleh kekhawatiran terhadap pemboman dan pembiusan. Meski orang Bobongko mayoritas menggantungkan hidupnya dari mengolah lahan pertanian, namun sebagian penduduk tetap memanfaatkan hasil laut dengan cara memancing atau menggunakan bagang. Pembiusan telah dianggap sebagai faktor

yang menyebabkan sulitnya mendapat ikan. Tadinya saya mencurigai analisis mereka bahwa pembiusan berakibat pada jumlah ikan akibat dari kehadiran CII atau kegiatan konservasi di sana. Tapi, komentar Hadi, pemilik bagang, maupun Iman yang sering mengail sepertinya lebih bersifat empirik. Iman pernah berkomentar ketika pergi mengail dengan saya di muka Teluk Kilat: “Tiap ada perahu yang dicurigai babius, kita usir... tapi, biasanya langsung saja setengah mati kita mengail, tak mau makan [umpan] ikan-ikannya”. Komentar Hadi, dan beberapa nelayan bagang lain pada sebuah pertemuan, menyebutkan: “kalo so mulai banyak itu orang Kabalutan, orang Tangkian, masuk, malamnya sedikit *ligo* digulung. Ikan tak mau lagi ke Kilat”.

Bagi saya Hadi justru lebih keras dibanding Azis. Beberapa orang di Lembanato sering mengatakan pada saya, bahwa Hadi memang cocok menjadi anggota kelompok pengelola DPL, karena ia berani, maklum ‘patah pinsil’. Istilah patah pinsil digunakan untuk menunjuk pada orang yang tidak tamat sekolah (SD), buta hurup, dan dikaitkan dengan sikapnya yang lebih mendahulukan penyelesaian fisik ketimbang fikiran dalam menyelesaikan masalah. Konsep ‘patah pinsil’ yang dikaitkan dengan posisi Hadi sebagai anggota DPL lebih kepada kapasitasnya yang berani mengambil tindakan tegas pada pelaku pemboman dan pembiusan di Teluk Kilat.

Hadi sendiri pernah bercerita, pernah siang hari ia menahan dan menggeledah sebuah perahu yang dicurigai sedang melakukan pembiusan ikan di dalam perairan Teluk Kilat. Ketika itu kebetulan ia sedang menjalankan perahu katinting menuju kebun. Ketika melintasi sebuah perahu, ia mendengar suara mesin kompresor. Ada dua orang lelaki di atas perahu tersebut. Salah seorang di antaranya seperti sedang mengintip ke dalam air. Terlihat olehnya selang warna kuning menjulur keluar dari badan perahu ke dalam laut. Seorang lainnya seperti mengulur selang tersebut dari atas perahu. Hadi merasa yakin bahwa orang-orang ini sedang membius ikan. Ia juga yakin ada seorang lagi yang ada di dalam laut sedang membius ikan. Ia langsung berbelok arah menuju perahu yang dicurigainya. “Saya langsung tanya mereka, sedang apa di sini. Mereka jawab sedang memanah ikan, ambil gurita juga. Saya tak percaya, lalu saya suruh temannya yang *bamudung* (menyelam) naik. Saya lihat ada

jeriken plastik di dalam perahu. Saya tanya ke mereka apa isi jeriken itu. Mereka bilang air minum. Saya masih tak percaya. Lalu saya suruh dorang minum, eee...dorang tak mau. Saya ambil parang. Kalo begitu, isi jeriken itu so pasti *potas* [cairan potasium]. Saya tanya dari mana mereka. Dorang bilang dari Kabalutan...Ooo, saya yakin babius mereka itu. Langsung saya suruh dorang pergi. Tadinya tak mau, tapi saya ancam pake parang dorang baru ketakutan, mereka kasih nyala mesin [katinting], langsung pergi cepat-cepat”, cerita Azis. Ketika saya tanya apakah ia tak takut orang itu melawan, biasanya mereka juga membawa bom ikan, dan yang pasti membawa panah ikan atau tombak. Hadi mengaku tidak pernah takut soal itu, meskipun ia sudah memperkirakan pula bahwa mereka mungkin saja melawan.

Cerita Hadi ini sempat muncul kembali dalam pikiran saya ketika berbincang dengan Mat, nelayan di Kabalutan. Mat berkisah tentang pengalamannya diancam parang oleh orang Lembanato saat sedang babius di muka dusun Titiri, di teluk Kilat. Saya coba menghubungkan hal ini dengan cerita Hadi, mungkinkah Mat orang Kabalutan yang dalam cerita Azis tadi. Mat juga pernah bercerita bahwa ia tak mau lagi ke teluk Kilat, meskipun hanya mengail atau memamah ikan. “Wah, jangan kalau Lembanato. Berani-berani sekali orang di sana itu”, kata Mat.

Kasus tentang Yusril di teluk Kilat ini hanya salah satu bentuk bagaimana pengendalian terhadap akses orang-orang Kabalutan, khususnya pelaku pemboman dan pembiusan ikan, dilakukan oleh desa lain. Hal yang dialami Yusril juga dialami oleh Wandu dan Manysur seperti diceritakan di atas. Perilaku orang Lembanato terhadap nelayan Kabalutan atau nelayan desa lain yang dicurigai babom atau babius tampak seperti tindakan-tindakan prosedural yang dilakukan aparat kepolisian atau petugas patroli perikanan. Tapi di kepulauan Togeang, tindakan seperti itu, juga oleh desa lain, agaknya bukan sebuah peniruan dari polisi atau institusi negara yang memiliki kewenangan atas hal itu. Saya menganggap apa yang dilakukan Pak Kepala dan orang-orang di Lembanato justru karena mereka merasa institusi negara tidak menjalankan perannya. Seperti pertanyaan orang Malenge dan Tumotok di atas soal ketidaktegasan polisi memberi sanksi hukum bagi pelaku pemboman dan pembiusan ikan. Persoalannya berakar pada harapan masyarakat bahwa hukum negara akan

membuat nelayan lebih diuntungkan. Polisi diharapkan membuat penegakan hukum sehingga babom dan babius tak dilakukan lagi. Orang-orang kepulauan Togean memahami bahwa peraturan tentang pemboman dan pembiusan itu ada. Pengetahuan mereka juga terbentuk lewat keterlibatan mereka dalam program-program konservasi oleh LSM, juga oleh wacana-wacana soal menurunnya hasil tangkapan ikan atau berkurangnya pendapatan daerah dari kedatangan turis karena terganggu oleh pemboman dan pembiusan ikan.

LSM konservasi lebih memandang persoalan hukum ini sebagai sebuah ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut yang merupakan kekayaan alam yang bersifat global karena kepulauan Togean adalah bagian dari *the World Coral Triangle*. Pemerintah menganggap lemahnya penegakan hukum akan mempengaruhi struktur ekonomi lokal dan pendapatan asli daerah serta gangguan ketertiban. Namun, bagi nelayan, baik yang babom dan babius maupun yang menentang kedua aktivitas ini, pengawasan yang ketat di Teluk Kilat sebagai cara agar sumber ekonomi keluarga mereka terjamin. Nelayan-nelayan bagang khawatir *ligo* semakin sulit ditangkap jika pengawasan tidak dilakukan. Bagi nelayan pelaku pemboman dan pembiusan, pengawasan menyebabkan mereka sulit mendapat ikan. Mereka merasa negosiasi dengan orang-orang desa lain sangat sulit dibanding dengan oknum-oknum di kepolisian.

Dalam perspektif lain, kondisi seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk dari kuatnya pluralisme hukum (*strong legal pluralism*), di mana ketika hukum negara melemah, maka bentuk-bentuk aturan non-negara, seperti masyarakat Lembanato, akan muncul (Griffith, 2005).

### **3.3.3. Konflik di Tanjung Keramat**

Mungkin, inilah konflik yang melibatkan nelayan, pemerintah dan pengusaha luar yang paling terkait dengan kegiatan pemboman dan pembiusan ikan di kepulauan Togean. Konflik di Tanjung Keramat inilah yang pada bagian berikutnya akan saya angkat sebagai salah satu konteks di mana konstruksi identitas dilakukan oleh nelayan suku Bajo di Kabalutan. Namun, pada bagian ini saya hanya akan

memperlihatkan tentang peran negara dan aktor lainnya dalam mendefinisikan hak-hak dan akses atas sumberdaya alam di laut.

Tanjung Keramat adalah nama sebuah tanjung yang terletak di ujung pulau Walea Bahi, bagian paling timur dari kepulauan Togean. Secara administratif, bagian daratan dari Tanjung Keramat ini masuk ke dalam wilayah desa Kondongan yang dihuni oleh orang-orang Saluan dan keturunan Gorontalo. Pada areal laut sekitar Tanjung Keramat terdapat pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh formasi terumbu karang, seperti pulau Poat dan pulau Dondola. Tahun 1998, Marine Rapid Assessment Program (MRAP) yang dilakukan tim peneliti biologi dari CI, YABSHI, Universitas Hasanuddin dan Lembaga Oseanologi-LIPI menyimpulkan bahwa kondisi terumbu karang di sekitar pulau Dondola termasuk dalam kategori sangat baik atau *excellent* (Allen and McKenna 2004).

**Gambar 3.3. Lokasi wisata penyelaman di Tanjung Keramat**



Sumber: [www.walea.com](http://www.walea.com)

Universitas Indonesia

Kondisi terumbu karang sekitar Tanjung Keramat yang sangat baik inilah yang mendorong PT. Walea Dive Resort (WDR) melakukan investasi di kepulauan Togean sejak sekitar tahun 1998 dan 1999. Berbekal ijin prinsip sebagai PMA dari BKPM Jakarta dan BKPM Sulawesi Tengah, Bupati Poso kemudian memberi hak menguasai atas wilayah daratan Tanjung Keramat dan sebagian areal laut sepanjang 200 meter yang ditarik dari garis pantai kepada WDR. Perusahaan milik investor asal Italia ini kemudian memulai bisnisnya dibidang pariwisata dengan membangun fasilitas penginapan, dermaga, dan melakukan proteksi terhadap wilayah laut sekitar Tanjung Keramat sebagai lokasi penyelaman bagi wisatawan.

Target pemasaran wisata oleh WDR adalah wisatawan paket khusus yang datang langsung dari Italia. Luca Gracia, warga negara Italia yang langsung mengelola WDR ini, dalam sebuah pertemuan dengan saya mengatakan bahwa wisatawan yang menginap di tempatnya adalah kelas 'berduit' yang membeli paket wisata langsung lewat kantor pemasaran mereka di Italia, bukan para *backpacker* seperti yang menjadi tamu penginapan lain di kepulauan Togean. Pada hari-hari tertentu Luca menuju Manado menjemput para turis atau mengambil pesanan yang khusus dikirim dari Italia, seperti keju.

Meski kebanyakan pekerja di WDR berasal dari Gorontalo, namun Luca mengatakan bahwa ia telah banyak memberi bantuan kepada penduduk di desa sekitarnya, seperti Kondongan, Pasokan dan Salinggoha. Desa-desa tersebut telah menerima bantuan berupa pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, penyediaan genset untuk penerangan, atau donasi-donasi tambahan saat ada acara-acara khusus di desa. Luca juga mengakui bahwa WDR secara rutin membeli berbagai hasil kebun dan hasil laut dari penduduk sekitarnya, seperti ikan, lobster, kepiting, sayuran, dan buah-buahan, baik untuk konsumsi karyawan WDR maupun wisatawan yang menginap. Ikan-ikan segar yang dibeli WDR juga dijadikan pakan untuk segerombolan ikan-ikan *bubara* dan *katombo* yang sengaja ia biarkan hidup dan membesar di bawah dermaga di muka WDR.

Pemboman dan pembusukan ikan oleh nelayan merupakan persoalan yang dianggap paling serius oleh pengelola WDR sejak perusahaan ini beroperasi di

kepulauan Togean. Seorang informan di WDR menyatakan bahwa pada saat pertama resort mereka berdiri, ada 34 lokasi terumbu karang yang dianggap masih sangat baik kondisinya sebagai titik penyelaman bagi wisatawan. Pada tahun 2001, ketika melakukan pertemuan dengan beberapa orang utusan Pemda Poso dan masyarakat desa sekitar Tanjung Keramat dan Kabalutan, WDR melaporkan bahwa lokasi penyelaman yang masih menarik bagi wisatawan tinggal sekitar 16 titik, sisanya semakin hancur oleh aktifitas pemboman dan pembiusan ikan serta wisatawan lain yang dibawa oleh *dive operator* lain yang ada di kepulauan Togean maupun kepulauan Banggai.

Bagi orang-orang Bajo di Kabalutan, hadirnya WDR dianggap sebagai titik awal menyusutnya akses mereka terhadap lokasi-lokasi terumbu karang yang sejak puluhan tahun sebelumnya telah menjadi sasaran mereka saat *bapongka*. Sebelum WDR datang, beberapa rumah kayu milik orang-orang Bajo telah berdiri di pantai Tanjung Keramat, termasuk beberapa *babaroh* yang didirikan di atas areal terumbu karang. Pembongkaran rumah-rumah dan *babaroh* milik orang Bajo asal Kabalutan ini pun dilakukan oleh perusahaan dengan alasan bangunan tersebut berada di dalam wilayah konsesi WDR, sebagaimana termuat dalam ijin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Poso. Sebuah dokumen laporan yang dikeluarkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Sulawesi Tengah seakan memaklumi pembongkaran tersebut dengan menyajikan dasar yuridis tindakan PT. Walea. Dokumen tersebut melaporkan:

Walaupun dalam poin 3 Pengumuman Bupati Poso No. 556/261/Dispar tertanggal 1 Mei 2000 secara tegas telah menyatakan: "Dilarang membangun rumah baru dan pondok-pondok jenis apapun dan rumah serta pondok yang sudah ada sebelumnya tidak boleh diperbesar atau dikembangkan lagi", namun dalam kenyataannya masyarakat nelayan Suku Bajo yang berasal dari desa Kealutan dan Jaya Bakti tersebut tetap saja membangun pondok-pondok baru di Tanjung Keramat, yang secara yuridis formal telah sah menjadi areal operasi PT. Walea (Hak Sewa Tanah seluas ± 7 Ha yang telah dikontrak PT. Walea dari masyarakat untuk jangka waktu 30 tahun).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dikutip dari "Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penanganan Kasus PT. Walea" yang dikeluarkan BAPEDALDA Sulteng tanggal 23 Oktober 2001. Tidak dipublikasikan.

Beberapa kali konflik antara nelayan asal Kabalutan dengan PT.WDR ini muncul. Biasanya, itu terjadi saat musim ikan lolosi atau ekor kuning tiba. Pada musim seperti itu, nelayan Kabalutan, dan juga dari desa lain, akan berkumpul dalam satu lokasi di sekitar area terumbu karang. Ratusan perahu saling berdekatan satu sama lain, mulai sore hingga malam hari. “Pokoknya tarik terus semampu kita, lolosi pasti dapat. Bisa pulang bawa satu perahu ful [penuh],” kata seorang nelayan di Kabalutan. Jika musim lolosi ini tiba, jumlah penampung ikan lolosi di Kabalutan juga lebih banyak dari biasanya. Saya menyaksikan, di atas sappa Ruma’, lokasi terumbu karang, puluhan perahu nelayan saling berdekatan. Mereka berteriak –teriak, tertawa, saling mengejek, atau saling melempar gurauan ketika *barenjo*, salah satu teknik memancing ikan lolosi. Ketika malam, lampu-lampu kecil di atas laut bagaikan pasar malam terlihat dari jauh. Menurut seorang ahli biologi, ikan lolosi ini terus berpindah mengikuti arus air laut dan makanan mereka. Oleh karenanya, ketika arus dan makanan mereka mengalir ke arah Tanjung Keramat, nelayan ini pun berbondong-bondong mengail hingga ke Tanjung keramat. Mengingat jarak antara Kabalutan dan Tanjung Keramat cukup jauh, sedangkan mereka harus setiap hari mengail lolosi, maka para nelayan ini akan membangun *babaroh* (semacam gubuk di atas karang) untuk tempat berteduh dan menginap. Selama ikan lolosi masih cukup banyak untuk ditangkap, selama itu pula mereka akan tetap *bapongka* dan tinggal di *babaroh-babaroh* mereka.

**Gambar 3.4. Orang-orang Bajo mengail di musim lolosi**



Sumber: Christo Hutabarat

Di sinilah persoalan muncul karena nelayan Kabalutan dianggap telah memasuki wilayah konsesi yang dikuasai WDR. Bagi nelayan Kabalutan, batas wilayah penyelaman turis tidak jelas karena WDR tidak memberi tanda. Luca hanya menunjukkan gambar peta yang ia terima bersamaan dengan surat izin dari Bupati Poso. Bagi nelayan Kabalutan, peta tersebut tetap tak membuat mereka paham di mana batas yang diakui oleh WDR. Tiap kali konflik muncul, soal batas ini menjadi salah satu yang diperdebatkan. Tidak hanya itu, *babaroh* yang mereka bangun di sekitar Tanjung Keramat juga dianggap mengganggu keamanan dan kenyamanan turis asing yang menginap di WDR. Luca dan pemerintah pernah membongkar paksa *babaroh-babaroh* tersebut, alasannya orang Kabalutan sudah sepakat untuk membongkarnya sendiri namun tak kunjung dilaksanakan. Alasan lain yang paling sering dikemukakan Luca adalah bahwa nelayan-nelayan dari Kabalutan ini sering

melakukan pemboman dan pembiusan ikan, sehingga dianggap merugikan bisnis yang ia jalani.

Pemerintah dan aparat keamanan yang ikut menangani masalah ini tak pernah dianggap memihak pada nelayan Kabalutan. “Luca itu banyak uang, siapa saja bisa dia bayar. Saya ini sampai berdiri di depan polisi Dolong, minta ditembak saja kalau mereka tetap mau usir orang-orang Kabalutan,” cerita Mbo Aiba, wanita tua yang diyakini orang Kabalutan memiliki ilmu kebal. Penggunaan petugas kepolisian untuk mengusir nelayan Bajo dari Kabalutan ini memang sering dilakukan. Bahkan WDR menyediakan pos khusus polisi di muka cottage dan menyediakan fasilitas serta gaji tambahan untuk mereka yang betugas.

